



# APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA

---



---

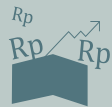
Ekonomi Kuat APBN Sehat



“Kalau anak muda sekarang kan *nabung* untuk *traveling*, kalau saya tetap memberi nasehat *traveling* di dalam negeri *aja*, supaya kontribusi (pajak retribusi) ke negara banyak, kalau anda *traveling* ke Jepang atau Bangkok, ya yang maju disana. Kita ke Raja ampat, Labuan Bajo, Dieng bagus-bagus *kok* disana.”

---

Menteri Keuangan pada acara We The Youth: Youth x Public Figure di XXI Epicentrum (12/5/2018)



### Realisasi Pendapatan Negara

Realisasi Pendapatan Negara telah mencapai Rp527,82 triliun atau telah terealisasi sebesar 27,86 persen dari target APBN 2018.



### Realisasi Belanja Negara

Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2018 sebesar Rp582,94 triliun.



### Realisasi Defisit APBN

Realisasi defisit APBN hingga April 2018 mencapai Rp55,12 triliun atau sekitar 0,37 persen terhadap PDB.



### Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2018 telah mencapai Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp237,65 triliun dan Dana Desa Rp14,27 triliun.



### Tingkat inflasi

laju inflasi tercatat sebesar 1,09 persen (ytd) atau 3,41 persen (yoy).



### Pertumbuhan Impor dan Ekspor

Impor mencatat pertumbuhan *double digit* sebesar 12,75 persen, jauh di atas kinerja ekspor yang hanya tumbuh 6,17 persen.



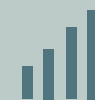
### Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sejak Triwulan IV- 2012 yaitu sebesar 7,95 persen



### Kinerja konsumsi pemerintah

Kinerja konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,73 persen, sedikit lebih baik dibanding capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,69 persen



### Kinerja perekonomian Indonesia

Kinerja perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi dibanding kinerja pada Triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen.

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Ditinjau dari perkembangan ekonomi makro, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut dapat dilihat dari kinerja perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2018 yang masih tumbuh lebih tinggi dibandingkan pada periode yang sama tahun 2017. Stabilitas kinerja konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi merupakan faktor internal yang mendorong pertumbuhan pendapatan negara terutama pada penerimaan perpajakan dan PNBPNP.

**Memasuki awal Triwulan II 2018, realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah telah mencapai Rp527,82 triliun atau telah terealisasi sebesar 27,86 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp416,93 triliun, PNBPNP sebesar Rp109,91 triliun, dan hibah sebesar Rp0,99 triliun atau masing-masing telah mencapai 25,77 persen, 39,90**

**persen, dan 83,24 persen dari target APBN 2018.** Sampai dengan akhir April 2018, pertumbuhan sumber penerimaan pendapatan negara dari perpajakan dan PNBPNP berturut-turut yaitu penerimaan perpajakan tumbuh 11,19 persen dan PNBPNP mampu tumbuh 21,02 persen secara *year-on-year* (yoy).

**Secara lebih rinci penerimaan perpajakan sampai dengan akhir April 2018 terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp383,27 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp33,66 triliun atau masing-masing telah terealisasi sebesar 26,91 persen dan 17,34 persen dari target APBN 2018.**

Realisasi penerimaan pajak pada periode Januari-April 2018 telah tumbuh sebesar 10,89 persen secara yoy, yang ditopang oleh tren pertumbuhan positif jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi yaitu pertumbuhan positif PPH non migas dan PPN, yang masih melanjutkan

tren positif pertumbuhan pada Triwulan I 2018. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir April 2018 terus tumbuh mencapai 14,85 persen secara yoy, yang didorong oleh kinerja ekspor impor Indonesia seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global dan harga komoditas.

**Pertumbuhan penerimaan PPh non migas sampai dengan akhir April 2018 masih didominasi oleh penerimaan Pajak atas Impor yang tumbuh mencapai 25,34 persen yoy yang utamanya dari PPh pasal 22 Impor (28,96 persen) dan PPh pasal 25/29 Badan tumbuh hingga 23,55 persen yoy.** Pelaporan SPT PPh Badan yang berakhir pada akhir bulan April 2018 lalu, turut memberikan dampak positif pada peningkatan penerimaan PPh non migas. Lebih lanjut, penerimaan PPh Badan tidak lepas dari tingginya pertumbuhan PPh pasal 29 yang mencapai 28,57 persen yoy, yang merupakan cerminan kinerja keuangan perusahaan pada tahun 2017. Pertumbuhan sektor usaha utama pendukung kinerja penerimaan perpajakan, seperti sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan juga turut memberi

andil bagi pertumbuhan penerimaan pajak, dimana masing-masing tumbuh 11,26 persen dan 29,43 persen yoy. Sedangkan penerimaan PPN Dalam Negeri pada periode Januari-April 2018, tumbuh hanya sebesar 9,53 persen secara yoy sebagai akibat pertumbuhan restitusi atas aktivitas ekspor yang volumenya meningkat sejak Triwulan IV 2017 hingga Triwulan I 2018 yang lalu, sebagai indikasi daya beli dan konsumsi domestik yang tetap terjaga pertumbuhannya.

**Capaian realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan akhir April 2018 didukung oleh pertumbuhan positif penerimaan cukai yang tumbuh 10,90 persen yoy, bea masuk tumbuh 14,77 persen yoy, dan Bea Keluar (BK) yang tumbuh signifikan mencapai 75,52 persen secara yoy, yang utamanya disumbang oleh komponen BK Mineral.** Pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai pada bulan April 2018 merupakan pertumbuhan positif yang pertama sejak tahun 2015, dimana juga terjadi pertumbuhan di seluruh jenis penerimaan kepabeanan dan cukai. Hal tersebut mengindikasikan aktivitas ekonomi yang masih terus

bergulir, selain juga dampak dari membaiknya ekonomi global dan meningkatnya harga komoditas di pasar internasional. Jika dilihat lebih dalam, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) masih mendominasi pertumbuhan penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir April 2018, dengan pertumbuhan 11,46 persen secara yoy. Efek kenaikan tarif cukai masih menjadi faktor utama kinerja penerimaan cukai. Hal ini dikarenakan tarif tertimbang efektif hingga April 2018 masih tumbuh sebesar 11,77 persen dan adanya pembayaran maju CHT oleh perusahaan rokok golongan 1. Sementara untuk penerimaan Bea Masuk (BM) dipengaruhi oleh meningkatnya devisa impor sebesar 10,99 persen yoy, yang didominasi oleh pertumbuhan impor bahan baku/bahan penolong dan barang konsumsi. Di sisi lain, penerimaan BK hingga akhir April 2018 menunjukkan kinerja tertinggi penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikontribusikan oleh ekspor komoditas tembaga, nikel, dan bauksit, selain juga dari ekspor komoditas biji kakao serta kayu dan kulit.

**Hingga 30 April 2018, PNBPN mencapai Rp109,90 triliun atau**

**mencapai 39,90 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp275,43 triliun.** Capaian PNBPN ini mengalami peningkatan sebesar 21,02 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian PNBPN tersebut didorong terutama oleh peningkatan penerimaan migas sebesar 45,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya karena adanya peningkatan harga ICP pada bulan April 2018 menjadi US\$67,43 per barel dari sebelumnya pada bulan Maret 2018 sebesar US\$61,87 per barel. Untuk penerimaan SDA nonmigas mampu tumbuh sebesar 15,64 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya, meskipun ada penurunan Harga Batubara Acuan (HBA) pada bulan April 2018 menjadi US\$94,75 per ton dari sebelumnya US\$101,89 per ton pada bulan Maret 2018. Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN) sampai dengan April 2018 mencapai 37,95 persen dari target APBN 2018 dan tumbuh sebesar 2,20 persen. Pada periode yang sama, PNBPN Lainnya telah mencapai 40,98 persen dari target APBN 2018 dengan penerimaan utama yang bersumber dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan

Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, serta Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan. Sementara itu, Pendapatan BLU mencapai 29,46 persen dari target APBN 2018 yang bersumber terutama dari Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat.

**Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir April 2018 sebesar Rp582,94 triliun, meningkat 8,33 persen jika dibandingkan realisasi April tahun sebelumnya.** Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp331,01 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp251,93 triliun. Pemerintah terus mendorong upaya perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBN dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Upaya perbaikan tersebut tercermin antara lain dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat hingga bulan April 2018 yang meningkat 21,39 persen jika dibandingkan dengan periode April tahun sebelumnya. Pertumbuhan realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut terutama dipengaruhi oleh realisasi Subsidi sebesar Rp40,74 triliun dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp30,73 triliun atau masing-masing mencapai 26,08 persen dan

37,82 persen dari pagu APBN tahun 2018. Tingginya realisasi Belanja Bantuan Sosial terutama dipengaruhi oleh percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan adanya penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).






**Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan April 2018 telah mencapai Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu dalam APBN 2018 yang meliputi Transfer ke Daerah (TKD) Rp237,65 triliun dan Dana Desa Rp14,27 triliun.** Realisasi TKD tersebut terdiri atas Dana Perimbangan Rp231,19 triliun atau 34,17 persen dari pagu APBN 2018, Dana Insentif Daerah (DID) Rp2,70 triliun (31,81 persen), dan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY Rp3,76 triliun (17,85 persen). Realisasi TKD sampai dengan April 2018 lebih rendah Rp11,13 triliun (4,47 persen) dibandingkan realisasi TKD pada periode yang sama tahun 2017. Lebih rendahnya realisasi TKD sampai dengan April 2018 tersebut terutama disebabkan oleh (i) lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) karena realisasi DBH sampai dengan April 2017 menampung juga kurang bayar DBH tahun sebelumnya dan adanya perubahan persentase penyaluran DBH Triwulan I dari 25 persen di tahun 2017 menjadi 20

persen pada tahun 2018; dan (2) lebih rendahnya realisasi DAK Fisik dan DID karena sebagian besar daerah penerima DAK Fisik dan DID belum dapat memenuhi syarat administrasi penyaluran kedua jenis dana dimaksud. Sementara itu, realisasi Dana Desa sampai dengan April 2018 lebih rendah Rp2,38 triliun (14,28 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh sebagian daerah belum dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I. Realisasi TKDD yang cukup besar ke daerah sejak Januari 2018 telah menjadi salah satu faktor pendorong aktivitas perekonomian masyarakat di daerah. Publikasi BPS pada awal Mei 2018 menunjukkan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan I 2018 seluruh provinsi mencapai 5,78 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I 2018 sebesar 5,06 persen. Pertumbuhan PDRB Triwulan I 2018 tersebut tertinggi terjadi di Provinsi Papua yang mencapai 28,93 persen sedangkan terendah minus 0,33 persen di provinsi Nusa Tenggara Barat.

**Pemerintah berupaya agar keberlanjutan fiskal di tahun 2018 tetap terjaga. Realisasi defisit APBN hingga April 2018 mencapai**

**Rp55,12 triliun atau sekitar 0,37 persen terhadap PDB.** Realisasi defisit tersebut lebih rendah dari realisasi defisit April 2017, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah yang senantiasa menjaga keberlanjutan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel. Sementara itu, realisasi pembiayaan yang dilakukan hingga April 2018 mencapai Rp188,71 triliun atau sudah mencapai 57,90 persen dari target APBN 2018. Realisasi pembiayaan tersebut bersumber terutama dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp189,70 triliun atau 45,76 persen dari target penerbitan di tahun 2018 dan pengadaan pinjaman (neto) sebesar negatif Rp421,70 triliun atau negatif 30,95 persen dari target tahun 2018. Dengan adanya realisasi pembiayaan tersebut, posisi utang hingga akhir April 2018 sebesar Rp4.180,61 triliun atau 29,88 persen terhadap PDB. Rasio utang Pemerintah tersebut masih di bawah 60 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003. Membaiknya fundamental perekonomian dan pengelolaan utang Pemerintah berdampak pada membaiknya peringkat kredit Indonesia yang mengindikasikan meningkatnya tingkat kepercayaan investor terhadap instrumen utang Indonesia.

# REALISASI APBN 2018 S/D 30 APRIL 2018

	APBN 2018	Realisasi s.d. 30 Apr	% thd APBN
 <b>PENDAPATAN NEGARA (A)</b>	1.894,72	527,82	27,86%
 <b>BELANJA NEGARA (B)</b>	2.220,66	582,94	26,25%
 <b>KESEIMBANGAN PRIMER</b>	(87,33)	24,19	(27,70%)
 <b>SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	(325,94)	(55,12)	16,91%
 <b>PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	325,94	188,71	57,90%

dalam triliun Rupiah

**P**emerintah terus berupaya melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBN Tahun 2018 secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Akselerasi belanja negara sampai dengan April 2018 mencapai Rp582,94 triliun atau 26,25 persen terhadap pagu APBN 2018 dengan pertumbuhan sebesar 8,33 persen yoy. Hal ini merupakan capaian terbaik dalam tiga tahun terakhir. Tren capaian yang semakin baik juga ditunjukkan pendapatan negara yang mampu mencapai Rp527,82 triliun atau 27,86 persen terhadap target APBN 2018. Kolaborasi dua sisi tersebut mampu menjaga defisit APBN sebesar 0,37 persen terhadap PDB (Rp55,12 triliun) atau persentase terendah dalam empat tahun terakhir untuk periode yang sama. Keseimbangan primer juga bergerak lebih baik (positif) pada angka Rp24,19 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu, yang mencapai Rp3,74 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran bunga utang semakin kecil.

Secara rinci realisasi pendapatan negara sampai dengan April 2018 sebagai berikut:

- Laju realisasi penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 11,19 persen atau mencapai Rp416,93 triliun atau 25,77 persen dari target APBN 2018 terutama bersumber dari:
  - Penerimaan Pajak tumbuh sebesar 10,89 persen dengan capaian sebesar Rp383,27 triliun atau 26,92 persen dari target APBN tahun 2018.
  - Penerimaan bea dan cukai tumbuh sebesar 17,34 persen dengan capaian sebesar Rp33,66 triliun atau 14,85 persen dari target APBN tahun 2018.
- Pertumbuhan realisasi PNPB juga menunjukkan nilai yang positif sebesar 21,02 persen dengan mampu membukukan nilai realisasi sebesar Rp109,90 triliun

atau 39,90 persen dari target APBN tahun 2018.

Selanjutnya, kinerja belanja negara sampai dengan April 2018 terdiri dari:

- Belanja pemerintah pusat tumbuh 21,39 persen mencapai Rp331,01 triliun atau 22,76 persen dari pagu APBN tahun 2018.
- Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sedikit mengalami penurunan sebesar 5,09 persen dengan capaian Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu APBN tahun 2018.

Dilihat dari sisi realisasi defisit APBN, kondisi realisasi APBN 2018 sampai dengan April 2018 merupakan yang paling sehat dan seimbang dalam 4 tahun terakhir (untuk periode yang sama). Indikasi tersebut ditunjukkan dengan perbandingan realisasi defisit anggaran sebesar 0,37 persen terhadap PDB atau Rp55,12 triliun (keseimbangan primer sebesar Rp24,19 triliun), turun dibandingkan defisit anggaran periode yang sama tahun 2017 yakni 0,53 persen terhadap PDB atau Rp72,17 triliun (keseimbangan primer sebesar Rp3,74 triliun). Dengan realisasi pembiayaan sebesar Rp188,71 triliun, terdapat kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp133,59 triliun.

# PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI

## Ulasan Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2018: Perekonomian Indonesia Terus Melangkah Maju

**K**inerja perekonomian Indonesia pada Triwulan I 2018 tumbuh 5,06 persen lebih tinggi dibanding kinerja pada Triwulan I 2017 sebesar 5,01 persen. Meskipun tidak sekuat yang diperkirakan, namun hal ini tetap mengindikasikan bahwa momentum peningkatan pertumbuhan terus berlanjut. Kinerja ekonomi Indonesia

pada periode ini terutama didorong oleh pertumbuhan investasi yang mencatat pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Di samping itu, kinerja pertumbuhan *double digit* impor yang ditopang oleh kenaikan impor barang modal mengindikasikan peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan di Indonesia. Peningkatan investasi dan impor barang modal pada periode ini diyakini akan menjadi kunci peningkatan kapasitas produksi dan aktivitas ekonomi di masa yang akan datang.

Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran.

(persen, yoy)

Komponen Pengeluaran (YoY)	2016					2017					2018
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1
Kons Rumah Tangga dan LNPRT	4,98	5,10	5,04	5,03	5,04	5,00	5,02	4,95	4,98	4,98	5,01
Kons Pemerintah	3,43	6,21	-2,95	-4,03	-0,14	2,69	-1,92	3,48	3,81	2,14	2,73
PMTB	4,67	4,18	4,24	4,79	4,47	4,77	5,34	7,08	7,27	6,15	7,95
Ekspor	-3,10	-1,50	-5,75	4,15	-1,57	8,41	2,80	17,01	8,50	9,09	6,17
Impor	-5,04	-3,47	-4,13	2,72	-2,45	4,81	0,20	15,46	11,81	8,06	12,75
PDB	4,94	5,21	5,03	4,94	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06

Sumber: BPS

Dari sisi pengeluaran, stabilitas kinerja konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi menopang kinerja perekonomian nasional. Konsumsi masyarakat yang terdiri atas rumah tangga dan lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) tumbuh relatif stabil sebesar 5,01

persen didukung oleh tingkat inflasi yang terjaga dan pelaksanaan bantuan sosial yang lebih tepat waktu. Hal ini tercermin pada beberapa komponen konsumsi pokok yang kembali menunjukkan tren peningkatan setelah sempat melambat dalam beberapa periode terakhir, seperti konsumsi kebutuhan pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Di samping itu, belanja masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) serentak 2018 di beberapa daerah pemilihan besar memberikan dorongan tambahan terhadap konsumsi masyarakat. Sementara itu, kinerja konsumsi pemerintah tumbuh positif 2,73 persen, sedikit lebih baik dibanding capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 2,69 persen. Kinerja tersebut terutama didukung oleh peningkatan realisasi belanja barang, belanja pegawai serta penyaluran bantuan sosial sepanjang Triwulan I.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sejak Triwulan IV-2012 yaitu sebesar 7,95 persen. Kinerja tersebut terutama didorong oleh kelanjutan proyek pembangunan infrastruktur fisik di berbagai daerah yang terlihat dari peningkatan komponen investasi bangunan dan konsumsi semen domestik di Triwulan I. Selain investasi bangunan, investasi dalam bentuk mesin dan perlengkapan, kendaraan dan peralatan lainnya juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan penjualan mobil niaga dan alat berat. Kenaikan komponen investasi non bangunan tersebut

bersumber dari peningkatan produksi industri domestik dan dukungan impor. Kondisi tersebut diperkirakan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi yang akan tercermin pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Dari sisi perdagangan internasional, impor mencatat pertumbuhan *double digit* sebesar 12,75 persen, jauh di atas kinerja ekspor yang hanya tumbuh 6,17 persen. Kinerja impor yang tinggi dipengaruhi oleh peningkatan permintaan domestik terhadap barang input produksi serta tingginya pertumbuhan impor barang modal seperti mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Sementara itu, pertumbuhan ekspor masih tumbuh positif meskipun tidak secepat laju pertumbuhan impor. Hal ini ditopang oleh peningkatan ekspor beberapa komoditas dan produk industri ke negara mitra dagang utama.

Dari sisi produksi, seluruh sektor mampu tumbuh positif pada Triwulan I 2018. Kinerja pertumbuhan ditopang oleh sektor-sektor kunci seperti industri pengolahan,

Pertumbuhan  
PDB menurut  
Lapangan Usaha.

perdagangan, konstruksi serta jasa-jasa. Sektor industri pengolahan (manufaktur) tumbuh sebesar **4,50 persen**, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2017 sebesar 4,28 persen. Kinerja positif tersebut terutama ditopang oleh peningkatan produksi pada kelompok industri makanan minuman, produk tekstil, serta produk kulit dan alas kaki seiring dengan peningkatan permintaan baik untuk ekspor maupun kebutuhan persiapan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Industri mesin dan perlengkapan

juga mencatat pertumbuhan yang tinggi sejalan dengan kinerja komponen investasi mesin dan perlengkapan. Namun demikian, terdapat pula beberapa kelompok industri yang mengalami penurunan kinerja seperti industri pengolahan tembakau, produk kertas, barang logam dan elektronik, serta industri kimia dan farmasi.

Sektor perdagangan juga mencatat pertumbuhan yang lebih baik yakni sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan sektor ini terutama didukung oleh

(persen, yoy)

Lapangan Usaha	2016					2017					2018
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1,47	3,48	3,18	5,53	3,36	7,15	3,23	2,77	2,24	3,81	3,14
Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,04	0,17	1,35	0,95	-1,22	2,12	1,84	0,08	0,69	0,74
Industri Pengolahan	4,68	4,62	4,47	3,28	4,26	4,28	3,50	4,85	4,46	4,27	4,50
Konstruksi	6,76	5,12	4,95	4,21	5,22	5,96	6,94	6,98	7,23	6,79	7,35
Perdagangan Besar dan Eceran	4,31	4,28	3,66	3,87	4,03	4,61	3,47	5,20	4,47	4,44	4,96
Transportasi & Pergudangan	7,42	6,52	8,18	7,64	7,45	8,06	8,80	8,88	8,21	8,49	8,59
Akomodasi & Makan Minum	5,73	5,16	5,00	4,82	5,17	5,27	5,73	5,69	5,49	5,55	5,54
Informasi dan Komunikasi	7,58	9,31	8,93	9,62	8,88	10,48	11,06	8,82	8,99	9,81	8,69
Jasa Keuangan dan Asuransi	9,32	13,60	9,04	4,18	8,90	5,99	5,94	6,16	3,85	5,48	4,38
Jasa-jasa lainnya	6,01	5,64	4,44	3,59	4,89	3,89	3,07	4,62	6,19	4,47	5,48
PDB	4,94	5,21	5,03	4,94	5,03	5,01	5,01	5,06	5,19	5,07	5,06

peningkatan penjualan alat berat dan kendaraan, khususnya kendaraan niaga. Kinerja sektor ini juga sejalan dengan peningkatan kinerja perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Sementara itu, sektor konstruksi juga terus menunjukkan peningkatan dengan tumbuh sebesar **7,35 persen**, lebih tinggi dibanding pertumbuhan Triwulan I tahun 2017 yang sebesar 5,96 persen. Kinerja sektor ini mampu tumbuh konsisten di atas pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh keberlanjutan pembangunan infrastruktur fisik baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun swasta.

Lebih jauh, sektor-sektor jasa yang terkait dengan konektivitas masyarakat dan aktivitas *leisure* menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sektor informasi dan komunikasi serta sektor transportasi dan pergudangan konsisten tumbuh tinggi masing-masing sebesar **8,69 persen** dan **8,59 persen**. Kinerja sektor informasi dan komunikasi masih didukung oleh peningkatan penetrasi penggunaan telepon seluler baik bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Di sisi sektor transportasi, kinerja didukung oleh adanya penambahan rute angkutan kereta api dan kapal laut serta kegiatan penunjang

transportasi seperti pergudangan dan pengiriman barang. Sementara itu, sektor akomodasi makan minum mencatatkan pertumbuhan **5,54 persen** yang ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata tingkat hunian kamar hotel dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, sektor jasa keuangan masih tumbuh relatif lambat sebesar 4,38 persen seiring dengan proses konsolidasi perbankan serta pertumbuhan kredit yang belum meningkat signifikan.

Sementara itu, sektor primer tumbuh positif meskipun belum mampu melewati capaian rata-rata nasional. Sektor pertanian tumbuh melambat sebesar 3,14 persen akibat kinerja produksi tanaman pangan yang menurun menyusul adanya beberapa panen raya yang tertunda. Meskipun demikian, kondisi cuaca secara umum cukup kondusif untuk mendukung kenaikan produksi kelompok perkebunan, hortikultura, kehutanan, dan perikanan. Sektor pertambangan hanya tumbuh 0,74 persen di tengah perbaikan harga-harga komoditas pertambangan secara umum. Bahkan kinerja kelompok pertambangan batu bara dan migas mengalami kontraksi pertumbuhan. Kinerja sektor ini diselamatkan oleh pertumbuhan tinggi yang dicapai kelompok



tambang bijih logam, yang didorong oleh peningkatan ekspor mineral logam dari Provinsi Papua.

Harga komoditas khususnya minyak bumi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Rata-rata Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price / ICP*) hingga bulan April tercatat sebesar 64,1 dolar AS per barel. Kenaikan harga ini sejalan dengan harga minyak mentah utama dunia yang sejak awal tahun meningkat dan mencapai harga tertinggi setelah penurunan di tahun 2014. Lonjakan harga di bulan April khususnya dipengaruhi oleh gangguan geopolitik yang semakin memanas antara Amerika Serikat dan Timur Tengah. Selain itu, ketidakmampuan Venezuela untuk kembali berproduksi di tengah kondisi perekonomian domestiknya yang semakin terpuruk juga mendorong penurunan produksi minyak mentah.

**Dilihat dari stabilitas ekonomi, meskipun laju inflasi berada pada level yang terkendali, terdapat tekanan pada sektor keuangan dan nilai tukar rupiah. Hingga April 2018, laju inflasi tercatat sebesar 1,09 persen (ytd) atau 3,41 persen (yoy).** Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2017, yaitu sebesar 1,28 persen (ytd) atau 4,17 persen (yoy). Pada bulan April, laju inflasi cukup terkendali, terutama dipengaruhi oleh panen raya padi serta mulai melimpahnya pasokan beberapa komoditas hortikultura. Secara bulanan, komponen *volatile food* mengalami deflasi 0,29 persen (mtm) dan memberikan sumbangan -0,05 persen. Komoditas beras kembali melanjutkan penurunan harga seiring dengan panen raya yang terjadi pada periode Maret - April. Ketersediaan stok beras baik yang berasal dari panen maupun tambahan stok beras Bulog diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

pada masa Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah Pusat dan Daerah akan berupaya menjalankan program stabilisasi harga bahan makanan pokok, terutama jelang Ramadan dan Lebaran melalui pemenuhan pasokan, pemantauan harga dan pengawasan distribusi, serta mengupayakan beberapa komoditas pangan pokok dijual sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

**Secara rata-rata, nilai tukar rupiah sampai April 2018 adalah Rp13.631 per dolar AS, atau mengalami depresiasi sebesar 1,83 persen dibandingkan rata-rata tahun 2017 yang mencapai Rp13.384 per dolar AS.** Pelemahan ini terjadi seiring dengan tingginya volatilitas pergerakan rupiah di kuartal I 2018 yang dipicu ketidakpastian terkait rencana kenaikan suku bunga acuan the Fed, reformasi perpajakan, perbaikan ekonomi dan inflasi AS. Faktor global lain seperti tingginya sentimen perang dagang antara AS dan Tiongkok, risiko geopolitik

di Timur Tengah, serta kenaikan harga minyak dunia juga berperan dalam meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Dari sisi domestik, tekanan juga datang akibat peningkatan permintaan valuta asing untuk kebutuhan pembayaran utang luar negeri, pembayaran dividen, kegiatan impor dan defisit transaksi berjalan.

Pelemahan tidak hanya dialami oleh rupiah namun juga oleh mata uang negara lain. Bauran kebijakan AS turut mendorong pelemahan mata uang global terutama negara mitra dagang utamanya. Di region Asia, India, Filipina dan Korea merupakan negara yang mengalami depresiasi paling dalam. Meskipun terjadi volatilitas nilai tukar rupiah di beberapa bulan terakhir, namun kondisi perekonomian masih sehat, terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi serta realisasi APBN sampai bulan April yang masih terjaga.

## Insentif Perpajakan Untuk Mendukung Investasi Dan Meningkatkan Daya Saing

Salah satu arah kebijakan perpajakan pada tahun 2018 adalah memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional dan tetap mendorong hilirisasi industri. Pemerintah konsisten untuk terus memberikan insentif agar dapat menarik lebih banyak investasi di dalam negeri, melalui upaya: a) Insentif pajak tepat sasaran; b) Fasilitasi Industri dan Perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM); serta c) Pengembangan/ perluasan fasilitas Kawasan Industri Tujuan Ekspor IKM.

Pada bulan April 2018, Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang *tax holiday* untuk mendorong investasi dan daya saing berupa PMK Nomor 35 tahun 2018. Regulasi ini bertujuan untuk memperbaiki skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas *tax holiday*.

Insentif pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) telah digulirkan sejak tahun 2011 dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun

2016. Pada tahun 2018 ini, Pemerintah kembali melakukan perubahan ketentuan yang mengatur *tax holiday* dengan fokus pada dua aspek yaitu perbaikan skema insentif yang lebih memberikan kepastian dan penyederhanaan prosedur permohonan dalam pemberian fasilitas *tax holiday*.

**Dari sisi skema insentif**, perubahan yang cukup besar adalah terkait dengan batasan nilai investasi minimal, persentase pengurangan dan jangka waktu pengurangan.

### Batasan nilai investasi minimal

Dalam aturan sebelumnya, batasan minimal investasi untuk mendapatkan *tax holiday* adalah Rp 1 triliun, kecuali industri telekomunikasi dan informatika yang diberikan batasan investasi minimal sebesar Rp 500 miliar. Di dalam aturan baru, batasan untuk seluruh industri pionir yang bisa mendapatkan fasilitas *tax holiday* adalah sebesar Rp 500 miliar.

### Persentase pengurangan

Dalam aturan sebelumnya, *tax holiday* diberikan dalam range dari 10% s.d. 100%. Guna lebih memberikan kepastian bagi Wajib Pajak atas fasilitas yang dapat mereka peroleh, persentase pengurangan disederhanakan menjadi tarif tunggal 100%.

### Jangka waktu pengurangan

Dalam aturan sebelumnya, jangka waktu pengurangan adalah 5 tahun s.d. 15 tahun dan dapat diperpanjang menjadi s.d. 20 tahun dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Guna lebih memberikan kepastian bagi Wajib

Pajak, jangka waktu pengurangan tersebut disesuaikan berdasarkan besarnya nilai investasi dari suatu penanaman modal yang diatur sebagai berikut:

No.	Nilai Investasi	Jangka Waktu Pengurangan PPh Badan
1.	Rp0,5 triliun s.d. < Rp1 triliun	5 tahun
2.	Rp1 triliun s.d. < Rp5 triliun	7 tahun
3.	Rp5 triliun s.d. < Rp15 triliun	10 tahun
4.	Rp15 triliun s.d. < Rp30 triliun	15 tahun
5.	≥ Rp30 triliun	20 tahun

Selain pengurangan 100% sesuai jangka waktu tersebut, Wajib Pajak juga diberikan jangka waktu transisi selama 2 tahun setelah jangka waktu pengurangan 100% tersebut berakhir, yaitu berupa pengurangan pajak penghasilan badan sebesar 50%.

**Dari sisi prosedur**, prosedur pengajuan fasilitas dan proses verifikasi dibuat lebih sederhana. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersamaan dengan permohonan Pendaftaran Penanaman Modal, atau paling lambat satu tahun setelah penerbitan Pendaftaran Penanaman Modal. BKPM kemudian akan menentukan kesesuaian dengan kriteria dan persyaratan. Apabila permohonan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria dan persyaratan, BKPM menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam 5 hari kerja, Menteri Keuangan akan memberikan keputusan atas usulan pemberian *tax holiday* tersebut. Pemanfaatan fasilitas mulai berlaku pada tahun pajak saat mulai berproduksi komersial yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

berdasarkan hasil pemeriksaan.

Selain *tax holiday*, jenis insentif pajak lainnya adalah berupa pemberian insentif atas pengembangan sektor panas bumi dan obligasi Pemerintah yang ditujukan untuk menarik minat investasi asing melalui PPh Ditanggung Pemerintah (PPH – DTP). Selain itu, untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, Pemerintah memberikan insentif pajak dalam bentuk Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM – DTP).

PPH Ditanggung Pemerintah maupun Bea Masuk Ditanggung Pemerintah telah dipublikasikan setiap tahun. Besaran anggarannya diusulkan oleh pembina sektor, disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran, dan masuk ke dalam postur APBN sebagai bagian dari anggaran pengelolaan belanja subsidi. Kebijakan PPh DTP dan BM DTP juga dimasukkan ke dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro - Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM – PPKF) maupun Nota Keuangan - Rancangan APBN setiap tahunnya. Kebijakan dan anggaran terkait PPh – DTP dan BM - DTP diatur melalui UU APBN. Sementara, besaran anggarannya menjadi bagian dalam lampiran Perpres Rincian APBN yang diterbitkan setiap tahun.

## Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, ICP, dan Kurs Terhadap APBN

**D**alam menjaga APBN pada tingkat defisit yang terkendali, Pemerintah terus meningkatkan kualitas APBN melalui pendapatan yang optimal baik dari sisi perpajakan maupun PNB. Sementara dari sisi belanja, berbagai upaya efisiensi dan kualitas belanja negara, baik melalui belanja pemerintah pusat maupun belanja transfer ke daerah dan dana desa, terus ditingkatkan dan dioptimalkan. Penghitungan APBN tidak terlepas dari asumsi dasar ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, harga minyak mentah ICP, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi, suku bunga, maupun volume lifting minyak dan gas.

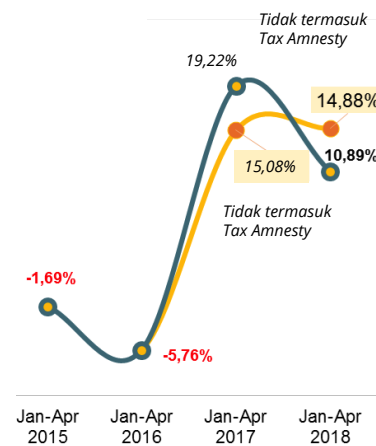
Perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi, harga minyak ICP, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sangat mempengaruhi realisasi APBN sampai dengan akhir April 2018. Meningkatnya harga minyak mentah, melemahnya nilai tukar Rupiah, dan relatif

stabilnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan APBN mengalami perubahan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja negara, yang pada akhirnya berpengaruh pada keseimbangan umum berupa defisit atau surplus. Dari sisi pendapatan negara, meningkatnya harga minyak mentah, melemahnya nilai tukar Rupiah, dan stabilnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PPh dan PNB di sektor minyak. Di sisi lain, belanja negara khususnya belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan di belanja subsidi energi (BBM dan listrik) dan pembayaran bunga utang luar negeri (akibat melemah nilai tukar Rupiah). Sementara, dari sisi belanja transfer ke daerah juga akan mengalami peningkatan khususnya dana bagi hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai konsekuensi dari meningkatnya PDN Netto. Namun demikian, alokasi DAU tidak mengalami perubahan selama tidak dilakukan perubahan APBN (APBNP).

Halaman Kosong

# PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan  
(y-o-y) Bulan  
Januari - April



**R**ealisasi penerimaan pajak periode Januari – April 2018 tercatat sebesar Rp 383,3 triliun atau tumbuh 10,89 persen secara yoy. Pertumbuhan positif ini ditopang oleh pertumbuhan PPh Non Migas yang mencapai 10,34 persen dan PPN yang tumbuh 14,09 persen. Pertumbuhan pada periode Januari – April ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2017 karena adanya penerimaan dari uang tebusan *Tax Amnesty*(TA)

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi  
Penerimaan  
Pajak s/d  
30 April 2018

Uraian	APBN 2018	Realisasi s/d 30 April 2018		
		Rp	Δ% 2017 - 2018	% thd APBN
Pajak Penghasilan	855,1	244,7	9,43%	28,62%
- Migas	38,1	21,1	0,66%	55,27%
- Non Migas	817,0	223,7	10,34%	27,38%
PPN & PPnBM	541,8	135,9	14,09%	25,08%
PBB & Pajak Lainnya	27,1	2,6	-8,44%	9,73%
<b>Jumlah</b>	<b>1.424,0</b>	<b>383,3</b>	<b>10,89%</b>	<b>26,91%</b>

yang tidak berulang di tahun 2018 dan nilainya cukup signifikan, mencapai Rp 12 triliun. Apabila tidak memperhitungkan uang tebusan TA Triwulan I 2017, maka pertumbuhan pada Januari – April 2018 mencapai 14,88 persen.

Pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2018 masih ditopang oleh jenis-jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, PPN Dalam Negeri, PPN Impor memberikan sinyal positif peningkatan aktivitas ekonomi setidaknya dari perspektif penerimaan pajak.

Pertumbuhan PPN Dalam Negeri sedikit melambat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Kondisi ini sedikit dipengaruhi oleh restitusi yang tumbuh 8,17 persen secara year-on-year atau mencapai Rp 36,38 triliun secara nominal di tahun 2018. Salah satu faktor pendorong pertumbuhan positif restitusi di tahun 2018 ini

adalah pertumbuhan volume ekspor di triwulan IV tahun 2017 yang mencapai 6,0 persen dan di triwulan I tahun 2018 yang mencapai 13,8 persen

Penerimaan PPh Badan sendiri tumbuh hingga 23,55 persen sementara pada periode yang sama tahun 2017 “hanya” tumbuh sebesar 7,82 persen. Kinerja positif PPh Badan di tahun 2018 tidak lepas dari tingginya pertumbuhan PPh Pasal 29 (kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh Badan) yang mencapai 28,57 persen secara year-on-year. Pertumbuhan positif PPh Pasal 29 Badan merupakan cerminan kinerja keuangan perusahaan di sepanjang tahun 2017. Perbaikan harga komoditas tambang di penghujung tahun 2017 mendorong peningkatan aktivitas produksi dan ekspor perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan termasuk jasa pendukungnya. Kondisi ini menjadi faktor utama tingginya penerimaan PPh Pasal 29 Badan dari sektor pertambangan di tahun 2018 yang mencapai Rp 16,14 triliun

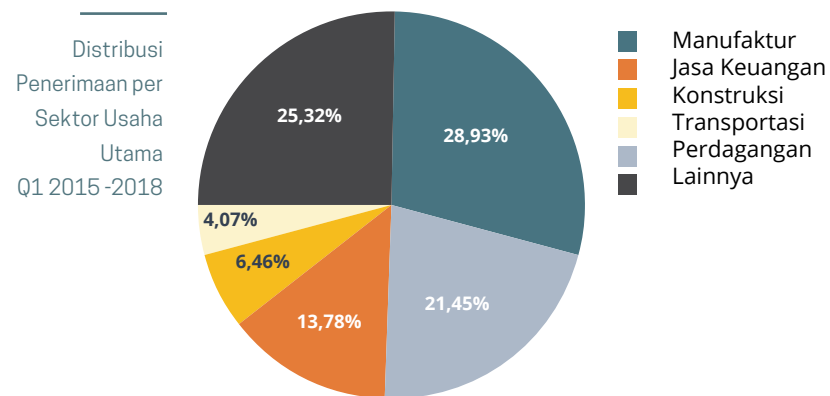
Pertumbuhan  
Pajak  
Berdasarkan  
Jenis

Jenis Pajak	growth	
	Januari - April 2017	Januari - April 2018
PPh Pasal 21	-0,09%	14,77%
PPh Badan	7,82%	23,55%
PPN Dalam Negeri	17,72%	9,53%
Pajak atas Impor	16,75%	25,34%
- PPh 22 Impor	13,83%	28,96%
- PPN Impor	18,65%	25,07%
- PPnBM Impor	-6,93%	-2,19%

atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (tumbuh 173,82 persen). Adapun sub-sektor penopang pertumbuhan termasuk dari sub-sektor pertambangan bijih logam, pertambangan batu bara, dan jasa pertambangan.

Kinerja positif penerimaan pajak juga tercermin dari penerimaan sektor usaha utama seperti Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tumbuh positif, berturut-turut tumbuh 11,26 persen dan 29,43 persen. Sejalan dengan pertumbuhan

PPh Pasal 29 Badan, secara keseluruhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan tumbuh 86,10 persen secara yoy atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun lalu (tumbuh 44,58 persen).



### Profitabilitas Perusahaan di Tahun 2017 Semakin Tinggi, Momentum Positif Penerimaan Pajak Tahun 2018

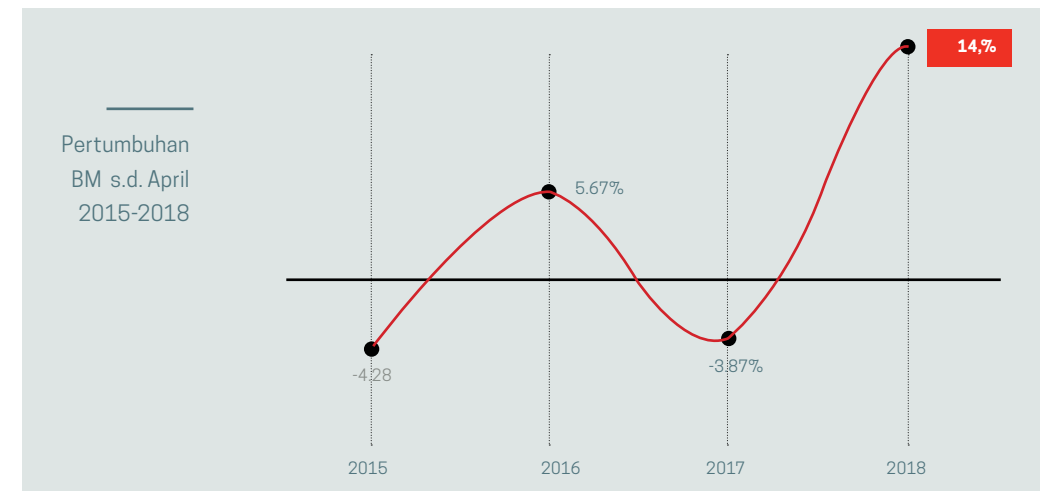
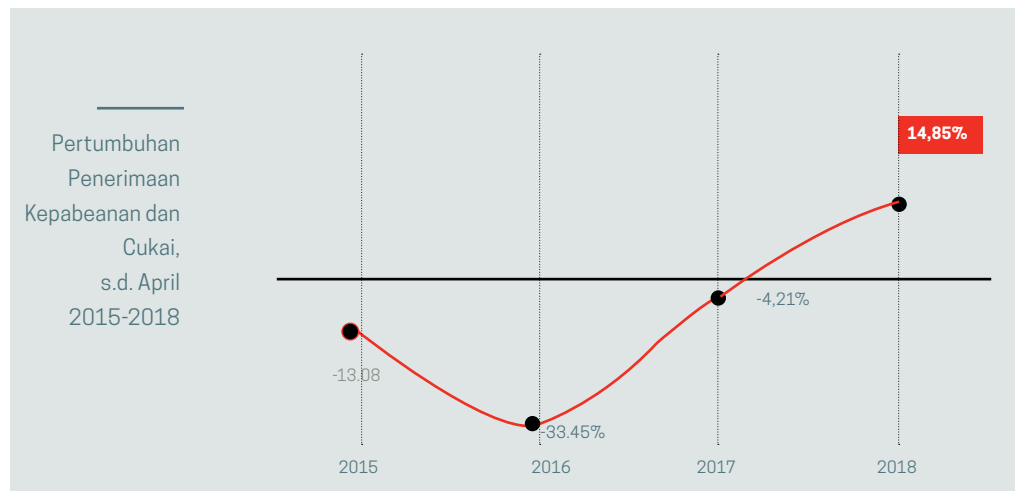
Tanggal 30 April 2018 merupakan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, bagi Wajib Pajak (WP) dengan periode pembukuan sama dengan tahun takwim (kalender; Januari – Desember). Sampai dengan tanggal 30 April 2018 terdapat 665 ribu SPT Tahunan Badan yang disampaikan oleh WP, atau tumbuh 11,23 persen secara yoy. Sejalan dengan perluasan dan peningkatan layanan *e-filing*, Direktorat Jenderal Pajak mencatatkan peningkatan jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang cukup signifikan (tumbuh 211 persen) dengan komposisi mencapai 35 persen dari keseluruhan SPT Tahunan PPh Badan yang diterima sampai dengan bulan April 2018.

Berdasarkan data SPT Tahunan yang diterima, terdapat peningkatan penghasilan usaha (penghasilan kena pajak) sebagai indikator membaiknya laba perusahaan sepanjang tahun 2017. Sebagai gambaran, terdapat sekitar 180 WP yang pada tahun 2017 menyampaikan SPT Tahunan Badan dengan total kerugian sebesar Rp 1,4 triliun sementara pada tahun 2018 ini menyampaikan SPT Tahunan Badan dengan total penghasilan sebesar Rp 281 miliar. Sementara itu terdapat sekitar 94 ribu WP Badan yang mengalami perbaikan usaha dengan pelaporan penghasilan dalam SPT Tahunan Badan tumbuh sebesar 17,4 persen dibandingkan pelaporan SPT Tahunan Badan di tahun 2017 (secara agregat). Dari 94 ribu WP tersebut, peningkatan laba terbesar berasal dari sektor usaha Pertambangan dengan pertumbuhan penghasilan kena pajak sebesar 93,71 persen secara yoy sejalan dengan perbaikan harga komoditas tambang di pasar global. Seiring dengan kinerja sektor pertambangan, 2 sektor utama yaitu sektor perdagangan dan sektor keuangan

turut mencatatkan pertumbuhan penghasilan kena pajak lebih dari 20 persen, berturut-turut sebesar 23,83 persen dan 25,76 persen. Sementara itu, WP di sektor industri pengolahan masih menunjukkan pertumbuhan yang moderat, yaitu 11,00 persen. Namun khusus industri orientasi ekspor seperti industri mobil, sepeda motor, minyak sawit, dan logam dasar menunjukkan kinerja yang positif dengan pertumbuhan penghasilan kena pajak sebesar 27,60 persen.

Peningkatan penghasilan kena pajak yang dilaporkan dalam SPT Badan khususnya dari sektor-sektor utama memberikan sinyal positif penerimaan pajak hingga akhir tahun, khususnya dari penerimaan PPh Pasal 25 (angsuran bulanan PPh Badan). Sinyal positif dan momentum pertumbuhan ini tentunya harus diikuti dengan dinamika perekonomian domestik dan global yang kondusif, mengingat ekspektasi kinerja perusahaan dapat mempengaruhi nilai pembayaran PPh Pasal 25 Badan (melalui permohonan penurunan pembayaran PPh Pasal 25 Badan).

# KEPABEANAN DAN CUKAI

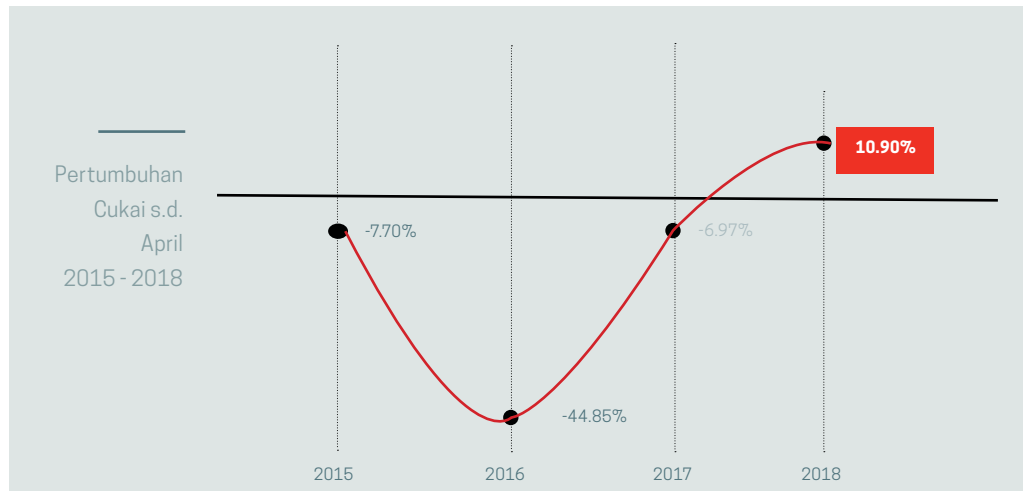


**P**enerimaan kepabeanan dan cukai hingga 30 April 2018 mencapai **Rp33,66 triliun** atau **17,34 persen dari target APBN 2018**, capaian ini naik sebesar Rp4,35 triliun atau 14,85 persen dibanding tahun lalu. Tren pertumbuhan penerimaan positif yang terjadi sejak awal tahun masih berlanjut. Pertumbuhan penerimaan bulan April 2018 ini merupakan titik balik dari pertumbuhan negatif sejak 2015. Demikian juga terjadi

pada semua komponen penerimaan seperti bea masuk (BM), cukai, dan bea keluar (BK) yang juga mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan penerimaan dari pajak dalam rangka impor (PDRI) adalah Rp75,58 triliun dengan rincian PPN Impor sebesar Rp56,14 triliun, PPnBM Impor sebesar Rp1,38 triliun dan PPh Pasal 22 Impor sebesar Rp18,06 triliun, sehingga total penerimaan yang berhasil dikumpulkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Rp109,24 triliun.

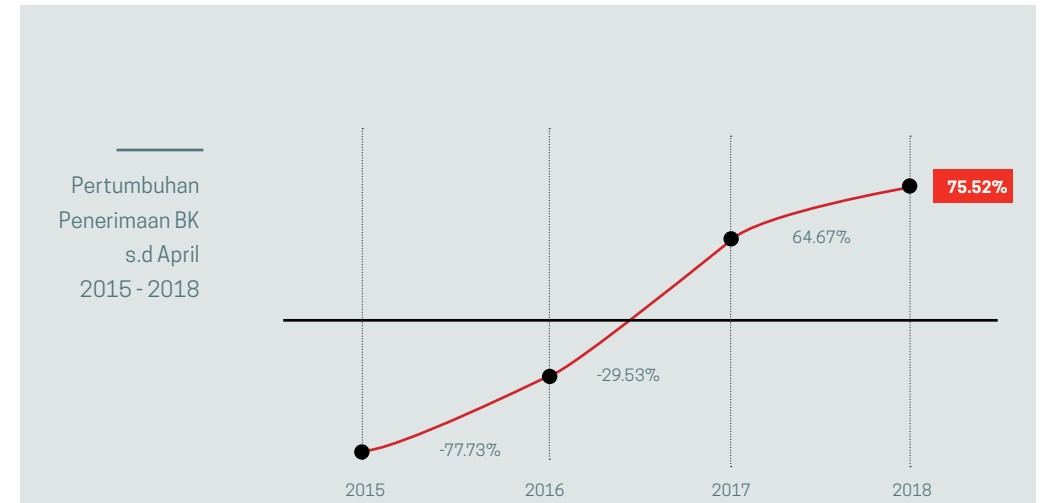
Penerimaan BM yang berhasil dikumpulkan hingga 30 April 2018 adalah **Rp11,73 triliun** atau **mencapai 32,86 persen dari target APBN 2018**. Capaian penerimaan BM ini mengalami pertumbuhan yang positif sebesar Rp1,51 triliun atau 14,77 persen, yang tentunya lebih baik dibandingkan pertumbuhan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar negatif 3,87 persen. Bahkan pertumbuhan BM bulan April 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2015. Pertumbuhan

penerimaan BM dipengaruhi oleh meningkatnya devisa impor sebesar 10,99 persen. Peningkatan tersebut didominasi oleh pertumbuhan impor Bahan Baku / Barang Penolong dan Barang Konsumsi yang naik masing-masing sebesar 6,61 persen dan 31,98 persen (yoy). Sektor Industri Pengolahan mendominasi impor dengan kontribusi sebesar 88,67 persen, sehingga menjadi indikasi aktivitas produktif dalam negeri yang masih menggeliat.



Penerimaan cukai hingga 30 April 2018 mencapai Rp19,85 triliun atau 12,78 persen dari target APBN 2018. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,95 triliun atau tumbuh 10,90 persen. Pertumbuhan penerimaan cukai bulan April 2018 juga menjadi pertumbuhan positif pertama sejak tahun 2015, sekaligus pertumbuhan tertinggi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nilai capaian penerimaan cukai menjadi komponen terbesar dalam penerimaan kepabeanan dan cukai. Kinerja penerimaan cukai didorong oleh penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) yang mencapai Rp18,32 triliun atau 12,36 persen dari target APBN 2018. Efek kenaikan tarif masih menjadi faktor utama kinerja penerimaan cukai, hal ini disebabkan oleh kenaikan tarif tertimbang efektif yang hingga April

2018 tumbuh sebesar 11,77 persen. Kenaikan ini melebihi kenaikan tarif rata-rata pada tahun 2018 yang sebesar 10,04 persen. Meningkatnya produksi hasil tembakau (HT) hingga April 2018 yang tumbuh 3,87 persen juga turut berkontribusi kepada kinerja cukai. Pertumbuhan produksi HT ini merupakan hal yang pertama terjadi sejak 3 tahun terakhir. Pada sisi arus kas, faktor pembayaran maju masih menjadi faktor utama, dengan pertumbuhan mencapai 102,1 persen yang didominasi oleh perusahaan rokok (PR) golongan 1. Penerimaan cukai dari minuman mengandung etil alkohol (MMEA) menjadi kontributor terbesar berikutnya dengan menyumbang penerimaan sebesar Rp1,46 triliun atau 22,54 persen dari target APBN 2018, diikuti kemudian oleh penerimaan cukai dari etil alkohol (EA) sebesar Rp0,05 triliun atau 28,26 persen dari target APBN 2018.



Penerimaan BK hingga 30 April 2018 adalah Rp2,08 triliun atau 69,17 persen dari target APBN 2018. Capaian tersebut lebih besar Rp0,89 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau tumbuh 75,52 persen. Persentase capaian BK terhadap target APBN 2018 dan persentase pertumbuhannya menjadi yang tertinggi dibanding komponen penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya. Pertumbuhan penerimaan

BK yang mencapai 75,52 persen tersebut merupakan pertumbuhan penerimaan BK tertinggi sejak tahun 2015. Kontribusi penerimaan BK berasal dari ekspor minerba yang terdiri dari komoditas tembaga, nikel, dan bauksit yang tumbuh 179,26 persen. Tambahan penerimaan BK lainnya didapat dari ekspor komoditas biji kakao serta kayu dan kulit yang tumbuh masing-masing 111,31 persen dan 24,34 persen.

# PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

(dalam miliar Rupiah)

Penerimaan Negara Bukan Pajak s.d. 30 April 2018	2018		Realisasi	
	APBN	s.d 30 April 2018	% thd APBN	Growth y-o-y (%)
I. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275.427,92	109.901,92	39,90%	21,02%
A. Penerimaan SDA	103.674,80	45.865,92	44,24%	37,64%
1 Migas	80.349,00	35.299,30	43,93%	45,95%
a Minyak Bumi	59.582,70	35.229,15	59,24%	45,95%
b Gas Alam	20.766,30	0,15	0,00%	0,00%
2 Non Migas	23.325,80	10.566,62	45,30%	15,64%
a Pertambangan Minerba	17.858,52	8.963,52	50,19%	15,67%
b Kehutanan	4.166,71	1.208,80	29,01%	4,83%
c Perikanan	600,00	173,73	28,95%	76,49%
d Pend. Per. Panas Bumi	700,59	220,58	31,48%	61,12%
B Pendapatan dari KND	44.695,40	16.953,00	37,93%	2,20%
C. PNBP Lainnya	83.753,12	34.324,40	40,98%	11,08%
D. Pendapatan BLU	43.304,60	12.758,60	29,46%	27,56%

Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi PNBP mencapai Rp109,90 triliun atau 39,90 persen dari APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 21,02 persen jika dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2017.

Kenaikan ini antara lain disebabkan meningkatnya harga komoditas, khususnya harga minyak bumi dan batu bara sepanjang periode Januari-April 2018.

Realisasi penerimaan SDA Migas mencapai Rp35,30 triliun atau

43,93 persen dari target APBN 2018. Realisasi tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 45,95 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Kenaikan penerimaan SDA Migas tersebut, antara lain disebabkan karena lebih tingginya realisasi ICP periode bulan Desember 2017 s.d. April 2018, yaitu sebesar USD63,49/barel atau periode bulan Januari s.d. April 2018, yaitu sebesar USD64,12/barel, dibandingkan realisasi ICP bulan Desember 2016 s.d. April 2017, yaitu sebesar USD50,75/barel atau periode bulan Januari s.d. April 2017, yaitu sebesar USD50,66/barel.

Realisasi penerimaan SDA Non Migas mencapai Rp10,57 triliun atau 45,30 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi 15,64 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp9,14 triliun. Peningkatan ini di antaranya disebabkan oleh kenaikan rata-rata HBA pada periode Januari – Apr 2018 yang mencapai US\$98,21 per ton, lebih tinggi dibandingkan HBA periode Januari – Apr 2017

sebesar US\$83,49 per ton.

Realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan mencapai Rp16,95 triliun atau 37,93 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Peningkatan nilai realisasi pendapatan dari kekayaan negara dipisahkan ini disebabkan adanya perbaikan kinerja BUMN, serta pembayaran piutang dividen tahun buku sebelum 2017 oleh beberapa BUMN.

Realisasi penerimaan PNBP Lainnya mencapai Rp34,32 triliun atau 40,98 persen terhadap APBN 2018. Realisasi tersebut meningkat sebesar 11,08 persen jika dibandingkan dengan periode April 2017 yang mencapai Rp30,90 triliun.

Untuk Pendapatan BLU, hingga 30 April 2018 terealisasi sebesar Rp12,76 triliun, atau mencapai 29,46 persen dari APBN 2018, meningkat 27,56 persen dari realisasi April 2017 yang hanya mencapai Rp10,00 triliun.



# BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat dipengaruhi Belanja Barang, Bantuan Sosial, dan Pembayaran Subsidi

(dalam triliun Rupiah)

Belanja Pemerintah Pusat (triliun Rupiah)	Realisasi			
	2018 APBN	s.d. 30 April 2018	% thd APBN	% Growth (yoy)
<b>Belanja K/L</b>	<b>847,44</b>	<b>165,88</b>	<b>19,57%</b>	<b>22,75%</b>
Belanja Pegawai	227,46	101,70	27,80%	1,74%
Belanja Barang	338,83	59,37	17,52%	26,33%
Belanja Modal	203,88	18,67	9,16%	-2,45%
Bantuan Sosial	77,26	30,73	39,78%	138,76%
<b>Belanja Non K/L</b>	<b>607,06</b>	<b>165,14</b>	<b>27,20%</b>	<b>46,83%</b>
Pembayaran Bunga Utang	238,61	79,31	33,24%	4,48%
Subsidi	156,23	40,74	26,08%	148,95%
Belanja Lain-lain	67,24	0,50	0,75%	-83,28%
<b>Jumlah</b>	<b>1.454,49</b>	<b>331,01</b>	<b>22,76%</b>	<b>33,69%</b>

Sampai dengan 30 April 2018, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp331,01 triliun atau 22,76 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Dengan demikian, realisasi Belanja Pemerintah Pusat selama bulan April mencapai Rp97,01 triliun atau sekitar 6,67 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi BPP tersebut lebih tinggi dari realisasi BPP pada periode yang sama tahun 2017, baik

dalam nominal maupun persentase. Realisasi BPP tersebut terdiri atas 1) belanja K/L sebesar Rp165,88 triliun atau 19,57 persen dari pagu alokasi APBN 2018, dan 2) Belanja NonK/L sebesar Rp165,14 triliun atau 27,20 persen dari pagu alokasi APBN 2018. Realisasi Belanja K/L sampai dengan April 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi Belanja K/L pada periode yang sama tahun 2017. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi

oleh tingginya realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial. Realisasi Bantuan Sosial tinggi terutama untuk penyaluran program-program perlindungan sosial, seperti percepatan penyaluran PKH dengan sasaran 10 juta keluarga (tahun sebelumnya 6 juta), serta dilakukannya pembayaran PBI di muka (sudah dilakukan pembayaran untuk 8 bulan), sebagai upaya untuk memperbaiki cash flow Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara untuk Belanja Barang lebih cepat karena menunjukkan percepatan kegiatan yang mendukung operasional pemerintahan. Sementara itu, realisasi Belanja Non-K/L terutama dipengaruhi lebih tingginya pembayaran subsidi energi, baik untuk tahun berjalan maupun kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

### Penyerapan Belanja K/L sampai dengan 30 April 2018 semakin meningkat

Penyerapan Belanja K/L sampai dengan 30 April 2018 lebih tinggi

sebesar 19,57 persen jika dibandingkan dengan realisasi Belanja K/L pada periode yang sama 2017 sebesar 16,92 persen dari pagu APBNP 2017. Terjadinya kondisi tersebut terutama didorong oleh tingginya realisasi Belanja Barang dan Bantuan Sosial. Meningkatnya kinerja belanja K/L pada bulan April 2018 dikarenakan adanya peningkatan realisasi pada Belanja Barang dan Bantuan Sosial. Semetara itu realisasi Belanja Modal pada bulan April 2018 sedikit melambat jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal pada periode yang sama tahun 2017, terutama pada belanja peralatan dan mesin. Kondisi tersebut terjadi disebabkan oleh proses penyelesaian administrasi lelang dan kontrak, khususnya K/L di luar 15 terbesar. Untuk realisasi K/L bidang prioritas infrastruktur pada bulan April 2018 mencapai 13,46 persen terhadap pagu alokasi APBN 2018, lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi K/L bidang infrastruktur tersebut pada periode yang sama 2017 yang hanya 13,00 persen terhadap pagu alokasi APBNP 2017.

Kegiatan K/L yang sudah dikontrakan sampai dengan 30 April 2018 telah mencapai Rp116,8 triliun triliun atau sebesar 57,30 persen dari pagu Belanja Modal sebesar Rp203,88 triliun. Meskipun penyerapan anggaran Belanja Modal relatif melambat, akan tetapi perkembangan penyerapan anggaran tidak selalu sama dengan perkembangan fisiknya. Sebagai contoh, progres perkembangan fisik untuk Kementerian PUPERA lebih cepat daripada perkembangan keuangannya.

Progres Kegiatan Prioritas/Utama Tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (s.d. April 2018)

No.	UNIT ORGANISASI / KEGIATAN PRIORITAS	TARGET TAHUN 2018	ALOKASI ANGGARAN (Ribu Rupiah)	PROGRES KEUANGAN	PROGRES FISIK
<b>A DITJEN SUMBER DAYA AIR</b>					
1	Bendungan	48 Bendungan	7.974.127.680	20,83%	20,68%
	a. Bendungan Baru	14 Bendungan	113.907.082	0,38%	0,39%
	b. Bendungan On Going	34 Bendungan	7.860.220.598	21,12%	22,45%
2	Embung	43 Buah	660.256.435	14,31%	11,00%
3	Air Baku	5,92m3/dt	2.548.331.145	19,63%	23,79%
4	Jaringan Irigasi	145.533 Ha	4.629.683.558	14,46%	18,17%
5	Sapras Pengendali Daya Rusak Air	221 Km	3.332.203.777	22,98%	28,05%
6	Pengendali Sedimen dan Lahar	31 Buah	233.859.725	19,28%	18,00%
<b>B DITJEN BINA MARGA</b>					
1	Pembangunan Jalan	1.350 Km	6.542.763.742	11,14%	13,15%
2	Pembangunan Jembatan	15.908 M	3.627.632.706	8,62%	14,71%
3	Pembangunan Jalan Tol	33,8 Km	1.946.062.130	39,57%	45,97%
<b>C DITJEN CIPTA KARYA</b>					
1	Pembangunan SPAM	3.437 ltr/dt	3.251.995.767	15,14%	13,83%
2	Penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh	1.991 Ha	1.637.745.763	11,10%	11,97%
3	Sanitasi dan Persampahan	2.095.063 KK	2.807.022.642	11,24%	11,22%
4	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	60.316 m2	3.127.291.335	20,11%	25,86%
<b>D DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN</b>					
1	Pembangunan Rumah Susun	13.500 Unit	4.817.944.424	4,33%	2,36%
2	Pembangunan Rumah Khusus	5.000 Unit	6644.519.551	6,13%	4,00%
3	Pembangunan Rumah Swadaya	250.000 Unit	3.216.664.000	1,32%	2,33%

Sebagian dari 15 K/L dengan pagu alokasi terbesar tahun 2018, penyerapan anggaran K/L tersebut lebih baik dibandingkan penyerapan pada periode yang sama tahun 2017. Selanjutnya, 7 dari 15 K/L dengan

pagu alokasi terbesar kinerja penyerapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daya serap nasional, yaitu: (1) Kementerian Kesehatan, (2) Kementerian Sosial, (3) Mahkamah Agung, (4) Kementerian Hukum dan HAM, (5) Kementerian Keuangan, (6) Kemenristek Dikti, dan (7) Kementerian Luar Negeri.

No.	KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA	2017			2018		
		APBNP	Realisasi s.d. 30 Apr	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 Apr	% thd APBN
1	KEMENHAN	114,82	19,03	16,57%	107,68	22,86	21,23%
2	KEMEN PU PERA	104,24	14,13	13,55%	107,39	15,00	13,97%
3	POLRI	98,22	16,95	17,26%	95,03	16,88	17,76%
4	KEMENAG	63,49	13,01	20,49%	62,15	12,88	20,72%
5	KEMENKES	55,86	13,62	24,38%	59,10	22,95	38,84%
6	KEMENHUB	44,64	5,43	12,16%	48,20	5,93	12,31%
7	KEMENKEU	40,54	10,88	26,83%	45,68	10,60	23,21%
8	KEMENDIKBUD	37,97	2,69	15,53%	40,09	11,57	28,03%
9	KEMENRISTEK DIKTI	39,49	7,06	17,87%	41,28	9,48	22,97%
10	KEMENTAN	24,15	5,57	14,67%	23,82	4,66	11,61%
11	KEMENSOS	17,32	3,94	16,30%	41,30	3,22	13,52%
12	KEMENKUMHAM	11,21	2,17	19,40%	10,59	2,85	26,89%
13	KKP	9,14	2,24	27,34%	7,29	2,24	27,11%
14	MA	8,18	0,77	8,46%	8,26	1,30	17,77%
15	KEMENLU	7,17	1,44	20,02%	7,25	1,59	21,93%
15 K/L dengan Pagu Terbesar		676,43	118,91	17,58%	705,12	144,01	20,42%
K/L Lainnya		122,16	16,23	13,28%	142,31	21,86	15,36%
<b>JUMLAH</b>		<b>798,59</b>	<b>135,14</b>	<b>16,92%</b>	<b>847,44</b>	<b>165,88</b>	<b>19,57%</b>

# TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp251,93 triliun atau 32,88 persen dari pagu alokasi TKDD dalam APBN 2018 sebesar Rp766,16 triliun. Realisasi tersebut berarti Rp13,5 triliun lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi TKDD pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp265,43 triliun, atau 34,6 persen dari pagu alokasi TKDD, terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi Dana Perimbangan, baik Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa.

## A. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). DTU terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), sedangkan DTK terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik.

Dalam APBN Tahun Anggaran (TA) 2018, Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp676,60 triliun, terdiri atas DTU sebesar Rp490,71 triliun, dan DTK sebesar Rp185,89 triliun. Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi Dana Perimbangan mencapai Rp231,20 triliun (34,2 persen dari pagunya dalam APBN TA 2018), atau Rp10,00 triliun lebih rendah dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp241,19 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN TA 2017. Hal ini terutama disebabkan oleh lebih rendahnya realisasi, baik Dana Transfer Umum maupun Dana Transfer Khusus.

## 1. DANA TRANSFER UMUM

Realisasi Dana Transfer Umum (DTU) sampai dengan 30 April 2018 mencapai Rp189,38 triliun atau 38,6 persen dari pagu anggaran DTU yang ditetapkan dalam APBN 2018 sebesar Rp490,71 triliun. Capaian ini berarti Rp7,41 triliun lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp196,79 triliun atau 39,8 persen dari pagu anggaran, terutama

berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi Dana Bagi Hasil.

### a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Sampai dengan 30 April 2018, realisasi penyaluran DAU telah mencapai Rp166,78 triliun, lebih tinggi sebesar Rp0,51 triliun bila dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp166,27 triliun. Selain dipengaruhi oleh adanya pengenaan sanksi berupa penundaan sebagian penyaluran DAU berkaitan dengan adanya keterlambatan, baik dalam penyampaian Perda APBD tahun 2018 oleh 3 daerah, maupun dalam penyampaian informasi bulanan berupa laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan laporan perkiraan belanja sampai dua belas bulan ke depan oleh 35 daerah, realisasi penyaluran DAU s.d. 30 April 2018 juga memperhitungkan penyelesaian tunggakan pinjaman daerah, penyelesaian pembayaran tunggakan BPJS pada dua belas pemerintah daerah, serta penyaluran kembali DAU yang ditunda karena telah menyampaikan laporan belanja infrastruktur, dan laporan informasi keuangan daerah bulanan

bulan Januari, Februari, dan Maret 2018. Secara umum, **DAU yang telah ditransfer mampu menjaga keseimbangan pelayanan dasar publik antardaerah.**

### b. Dana Bagi Hasil (DBH)

Pada APBN tahun 2018, pagu anggaran DBH ditetapkan sebesar Rp89,23 triliun, atau Rp6,15 triliun lebih kecil bila dibandingkan pagu alokasinya pada tahun sebelumnya. Hingga 30 April 2018, realisasi penyaluran DBH baru mencapai sebesar Rp22,60 triliun, atau 25,33 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2018. Jumlah ini, berarti lebih rendah Rp7,91 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama di tahun 2017 sebesar Rp30,52 triliun. Hal ini, terutama berkaitan dengan adanya penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2015 pada bulan Februari tahun 2017 sebesar Rp10,85 triliun, dan perubahan persentase penyaluran DBH Triwulan I dan Triwulan II, dari yang semula sebesar 25 persen dari pagu alokasi (PMK 50/PMK.07/2017) pada tahun 2017, menjadi 20 persen dari pagu alokasi (PMK 112/PMK.07/2017) pada tahun

2018. Perubahan kebijakan persentase penyaluran tersebut dimaksudkan dalam rangka mengurangi risiko terjadinya potensi Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada tahun 2018.

## 2. DANA TRANSFER KHUSUS

Dalam APBN TA 2018, Dana Transfer Khusus (DTK) dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah dan sejalan dengan prioritas nasional, dianggarkan sebesar Rp185,89 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp62,44 triliun, dan DAK Nonfisik sebesar Rp123,45 triliun. Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi penyaluran DTK mencapai Rp41,81 triliun, atau 22,49 persen dari pagunya dalam APBN TA 2018, yang berarti Rp2,59 triliun lebih rendah bila dibandingkan dengan realisasinya periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp44,40 triliun atau 24,05 persen dari pagu APBN TA 2017. Hal ini terutama berkaitan dengan lebih rendahnya realisasi DAK Fisik.

### a. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Dalam APBN tahun 2018, pagu anggaran DAK Fisik ditetapkan sebesar Rp62,44 triliun. Dalam rangka memastikan agar pelaksanaan kegiatan di daerah sejalan dengan target capaian prioritas nasional, pada tahun 2018 ini, dilakukan penyempurnaan peraturan

pelaksanaan DAK Fisik, dengan penambahan syarat penyaluran tahap pertama, yaitu daftar Rencana Kegiatan dan Daftar Kontrak DAK Fisik, selain Perda APBD dan Laporan Pelaksanaan Tahun sebelumnya.

Sampai dengan 30 April 2018, realisasi penyaluran DAK Fisik tercatat sebesar Rp849,64 miliar, terdiri dari DAK Reguler sebesar Rp446,13 miliar, DAK Penugasan Rp346,63 miliar, dan DAK Afirmasi sebesar Rp56,88 miliar. Jumlah realisasi DAK Fisik ini berarti lebih rendah Rp14,34 triliun bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 yang mencapai Rp15,19 triliun. Lebih rendahnya realisasi penyaluran DAK Fisik pada tahun 2018 ini, terutama berkaitan dengan adanya perubahan syarat penyaluran DAK Fisik, yaitu penambahan daftar kontrak DAK Fisik. Perlu diinformasikan bahwa pada saat ini, sebagian besar daerah masih dalam proses lelang. Dalam rangka mempercepat proses penyaluran DAK Fisik, Kementerian Keuangan telah dan akan terus melakukan sosialisasi kepada daerah, memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPPN, serta menyampaikan informasi melalui *SMS Blast* dan surat kepada daerah untuk meminta percepatan penyelesaian Kontrak DAK fisik.

Realisasi penyaluran DAK Fisik Reguler terbesar terdapat pada bidang jalan sebesar Rp200,82 miliar, bidang

kesehatan dan KB sebesar Rp132,18 miliar, dan bidang pendidikan sebesar Rp74,68 miliar. Untuk DAK Penugasan, realisasi penyaluran terbesar terdapat pada bidang jalan sebesar Rp187,33 miliar, bidang irigasi sebesar Rp72,19 miliar, dan bidang kesehatan sebesar Rp44,71 miliar. Sementara itu, realisasi penyaluran DAK Afirmasi terbesar terdapat pada bidang kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar Rp25,70 miliar, dan Rp18,70 miliar.

### b. Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik

Dalam rangka meringankan beban masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dalam APBN tahun 2018 alokasi anggaran DAK Nonfisik ditetapkan sebesar Rp123,45 triliun. Hingga tanggal 30 April 2018, realisasi penyaluran DAK Nonfisik mencapai Rp40,96 triliun, atau 33,18 persen dari pagu alokasi yang ditetapkan pada APBN 2018. Jumlah ini, berarti Rp11,74 triliun lebih tinggi bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp29,21 triliun, atau 25,38 persen dari pagu. Peningkatan realisasi DAK Nonfisik tersebut antara lain didukung oleh : (i) percepatan penyaluran dana BOS Triwulan II, pada bulan April 2018, yang sudah dilakukan oleh 21 provinsi; (ii) peningkatan pagu alokasi BOKB; (iii) peningkatan pemahaman daerah yang semakin baik terhadap ketentuan

penyaluran berdasarkan kinerja; serta (iv) perubahan mekanisme penyaluran dana BOK dari per triwulan menjadi per semester.

Sementara itu, penyaluran dana BOP PAUD juga membaik, sehingga realisasinya sampai dengan tanggal 30 April 2018 mencapai Rp2,88 triliun, atau naik Rp1,09 triliun dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp1,79 triliun. Sebaliknya, realisasi penyaluran dana tunjangan guru bulan April 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan kinerja penyalurannya pada periode yang sama tahun lalu, disebabkan masih rendahnya kepatuhan pelaporan oleh daerah.

Untuk meningkatkan capaian realisasi penyaluran DAK Nonfisik tersebut, Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya, antara lain berkoordinasi dengan K/L pengampu untuk mendorong daerah segera menyampaikan laporan DAK Nonfisik (melalui sosialisasi, rekonsiliasi, penyampaian surat, dan kegiatan lainnya).

## B. DANA INSENTIF DAERAH

**Dana Insentif Daerah (DID) yang dimaksudkan untuk memotivasi dan memacu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan prestasi dan kinerja di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan publik, dan**

**kesejahteraan masyarakat** dalam APBN 2018, ditetapkan sebesar Rp8,50 triliun, atau naik Rp1,00 triliun jika dibandingkan dengan pagu anggaran DID tahun 2017.

Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi penyaluran DID mencapai Rp2,70 triliun (31,81 persen dari pagu alokasi), yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp1,77 triliun jika dibandingkan dengan realisasinya pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp4,48 triliun atau 59,7 persen dari pagu alokasinya. Masih rendahnya realisasi penyaluran DID tersebut, antara lain disebabkan belum lengkapnya dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagai persyaratan penyaluran. Penyaluran DID Tahap I dilakukan setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan DID tahun sebelumnya bagi yang menerima, Perda APBD, dan rencana penggunaan DID tahun berjalan.

#### C. DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA KEISTIMEWAAN DIY

Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sebagai wujud nyata pelaksanaan desentralisasi asimetris, bagi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur pada Provinsi Papua dan Papua Barat ditetapkan sebesar Rp20,06 triliun, atau naik Rp0,62 triliun dari pagu anggaran Dana

Otsus tahun 2017 sebesar Rp19,44 triliun.

Sampai dengan 30 April 2018, realisasi penyaluran Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur mencapai Rp3,61 triliun atau 17,99 persen dari pagu, yang berarti Rp1,14 triliun lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,47 triliun atau 12,7 persen dari pagu alokasinya. Di sisi lain, penyaluran Dana Otsus kepada Provinsi Aceh belum dapat dilakukan pada bulan April, terutama karena provinsi tersebut belum memenuhi persyaratan penyaluran Dana Otsus Tahap I.

Sementara itu, Dana Keistimewaan yang diberikan kepada Provinsi DI Yogyakarta (DIY) dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan keistimewaan, sampai dengan 30 April 2018, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp150,00 miliar, atau 15 persen dari pagu anggaran Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,00 triliun, yang berarti Rp490 miliar lebih rendah bila dibandingkan dengan kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp640 miliar, atau 80,0 persen dari pagu Dana Keistimewaan DIY 2017 sebesar Rp800 miliar. Realisasi penyaluran yang lebih rendah tersebut disebabkan Pemerintah Prov. DIY baru dapat memenuhi persyaratan

penyaluran Dana Keistimewaan DIY tahun 2018 Tahap II pada akhir bulan April, sehingga penyaluran baru dapat dilaksanakan pada awal bulan Mei.

#### D. DANA DESA

Dalam APBN 2018, pagu anggaran Dana Desa yang dimaksudkan untuk mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, ditetapkan sebesar Rp60,00 triliun. Sampai dengan tanggal 30 April 2018, realisasi anggaran Dana Desa yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD sebesar Rp14,27 triliun, atau 23,79 persen dari pagu alokasi. Realisasi ini, berarti Rp2,38 triliun lebih rendah bila dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp16,65 triliun atau 27,8 persen dari pagu alokasinya. Namun demikian, realisasi penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sampai dengan tanggal 30 April 2018 sebesar Rp3,4 triliun, lebih tinggi Rp1,3 triliun bila dibanding kinerja realisasinya pada periode yang sama tahun lalu, sebesar Rp2,1 triliun.

Lebih tingginya realisasi penyaluran Dana Desa ke RKD tersebut terutama karena pada tahun 2018, Dana Desa disalurkan paling cepat bulan Januari dari sebelumnya disalurkan paling cepat pada bulan Maret.

Beberapa faktor yang menyebabkan penyaluran Dana Desa Tahap I belum terealisasi sepenuhnya, baik dari RKUN ke RKUD maupun dari RKUD ke RKD, yaitu (i) masih terdapat daerah

yang belum menetapkan Perkada tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa, dan (ii) Penetapan Perdes APBDes yang terlambat dikarenakan adanya (a) penyesuaian APBDes terkait pelaksanaan Dana Desa dengan skema padat karya tunai yaitu pemenuhan sedikitnya 30 persen dari Dana Desa untuk bidang pembangunan wajib digunakan untuk upah tenaga kerja (HOK), (b) belum adanya kesepakatan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembahasan Rancangan Perdes APBDes, (c) pergantian aparat desa, serta (d) lambannya proses asistensi penyusunan RKPDesa dan APBDesa di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, masih rendahnya realisasi penyaluran Dana Desa Tahap II, terutama karena pemerintah daerah masih fokus pada upaya penyaluran Dana Desa Tahap I sebesar 20 persen dari RKUD ke RKD, sehingga penyaluran Dana Desa Tahap II sebesar 40 persen mengalami keterlambatan.

Namun demikian, dengan intensifnya upaya dan sinergi pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperkirakan capaian penyaluran Dana Desa Semester I tahun 2018 ini, akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian penyaluran Dana Desa Semester I tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, dengan dimajukannya batas akhir penyaluran dana desa Tahap I dan Tahap II tahun 2018 menjadi paling lambat bulan Juni,

dibandingkan tahun lalu paling lambat bulan Juli, capaian kinerja penyaluran Dana Desa Semester I tahun 2018 diperkirakan akan lebih besar jika dibandingkan dengan kinerja penyaluran pada semester I tahun 2017.

Dalam rangka mempercepat proses penyaluran Dana Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa upaya, antara lain (i) menyampaikan surat kepada seluruh bupati/wali kota mengenai langkah-langkah percepatan penyaluran Dana Desa mulai bulan Januari; (ii) mengadakan kegiatan diseminasi Dana Desa yang juga mengundang Kepala Desa; (iii) melaksanakan workshop regional percepatan penyaluran Dana Desa TA 2018 pada tanggal 16 sampai 18 April 2018 di 3 lokasi, yaitu Kota Batam untuk Wilayah Sumatera dan Provinsi Kalimantan Barat, Kota Surabaya untuk Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Kalimantan, dan Kota Makassar untuk Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua, dalam rangka mendukung pelaksanaan padat karya tunai dan penanganan stunting di desa, dengan mengundang seluruh 434 daerah penerima Dana Desa; (iv) relaksasi pengaturan dalam APBDDesa sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap I, yaitu bagi desa yang sudah menetapkan Perdes APBDDesa namun belum memenuhi minimal 30 persen HOK, maka dapat mengajukan pencairan Dana Desa tahap I dengan menyampaikan Perdes APBDDesa yang sudah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dilakukan penyesuaian APBDDesa dengan memenuhi minimal 30 persen HOK pada saat pengajuan pencairan tahap II atau tahap III. Dalam hal ini, pemenuhan 30 persen HOK dimaksud tidak didasarkan per kegiatan, namun dihitung secara akumulasi dari keseluruhan nilai kegiatan di bidang pembangunan desa; (v) menetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, di mana

perubahan APBDDesa yang diakibatkan oleh adanya perubahan kebijakan dapat dilakukan melalui Perkades tentang Penjabaran APBDDesa yang dapat ditampung dalam APBDDesa Perubahan; serta (v) mengundang kembali seluruh Bupati/Wali Kota, dalam rangka percepatan penyaluran Dana Desa. Dalam kegiatan ini dihadirkan narasumber dari Kemenko PMK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, serta Kantor Staf Presiden. Dalam pertemuan ini diharapkan adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk mendukung percepatan penyaluran Dana Desa ke RKD.

#### Realisasi TKDD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 (YoY)

Tanggal : 1 Januari s.d. 30 April 2018

(dalam miliar Rupiah)

Uraian	2017			2018		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
<b>Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>766,339.32</b>	<b>265,433.62</b>	<b>34.64</b>	<b>766,162.59</b>	<b>251,929.15</b>	<b>32.88</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>706,339.32</b>	<b>248,782.32</b>	<b>35.22</b>	<b>706,162.59</b>	<b>237,654.82</b>	<b>33.65</b>
<b>A. Dana Perimbangan</b>	<b>678,596.03</b>	<b>241,192.57</b>	<b>35.54</b>	<b>676,602.99</b>	<b>231,192.25</b>	<b>34.17</b>
1. Dana Transfer Umum	493,959.53	196,791.17	39.84	490,714.92	189,383.28	38.59
a. Dana Bagi Hasil	95,377.22	30,519.37	32.00	89,225.34	22,604.60	25.33
b. Dana Alokasi Umum	398,582.31	166,271.80	41.72	401,489.58	166,778.68	41.54
2. Dana Transfer Khusus	184,636.50	44,401.40	24.05	185,888.07	41,808.97	22.49
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	69,531.50	15,186.85	21.84	62,436.26	849.64	1.36
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	115,105.00	29,214.55	25.38	123,451.81	40,959.33	33.18
<b>B. Dana Insentif Daerah</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,477.50</b>	<b>59.70</b>	<b>8,500.00</b>	<b>2,703.63</b>	<b>31.81</b>
<b>C. Dana Otsus, DTI, dan Dana Keistimewaan DIY</b>	<b>20,243.29</b>	<b>3,112.25</b>	<b>15.37</b>	<b>21,059.60</b>	<b>3,758.94</b>	<b>17.85</b>
1. Dana Otsus dan DTI	19,443.29	2,472.25	12.72	20,059.60	3,608.94	17.99
a. Prov. Papua dan Papua Barat	7,971.65	842.35	10.57	8,029.80	2,408.94	30.00
b. Provinsi Aceh	7,971.65	842.35	10.57	8,029.80	-	0.00
c. Dana Tambahan Infrastruktur	3,500.00	787.50	22.50	4,000.00	1,200.00	30.00
2. Dana Keistimewaan D.I.Y	800.00	640.00	80.00	1,000.00	150.00	15.00
<b>Dana Desa</b>	<b>60,000.00</b>	<b>16,651.30</b>	<b>27.75</b>	<b>60,000.00</b>	<b>14,274.33</b>	<b>23.79</b>

# PEMBIAYAAN UTANG

(dalam Triliun Rupiah)

	APBN 2018	Realisasi		% Growth (yoy)
		Apr 2018	% APBN	
<b>Pembiayaan Utang</b>	<b>399,22</b>	<b>187,16</b>	<b>46,88%</b>	<b>-3,34%</b>
<b>1. Surat Berharga Negara (Neto)</b>	<b>414,52</b>	<b>180,70</b>	<b>45,76%</b>	<b>-6,45%</b>
<b>2. Pinjaman (Neto)</b>	<b>(15,30)</b>	<b>(2,53)</b>	<b>16,55%</b>	<b>-72,32%</b>
a. Pinjaman Dalam Negeri(Neto)	3,14	(0,42)	-13,44%	0,00%
i. Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto)	4,50	0,00	0,00%	0,00%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman DN	(1,37)	(0,42)	30,96%	0,00%
b. Pinjaman Luar Negeri(Neto)	(18,44)	(2,11)	11,44%	-76,31%
i. Penarikan Pinjaman Luar Negeri(Bruto)	51,35	17,56	34,21%	125,17%
ii. Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman LN	(69,79)	(19,68)	28,19%	17,75%

## Pembiayaan Utang

Jumlah pembiayaan melalui utang secara neto sebesar Rp399,22 triliun yang diamanatkan untuk pembiayaan defisit APBN 2018, sebesar Rp414,52 triliun merupakan porsi Surat Berharga Negara (SBN), sementara porsi Pinjaman sebesar minus Rp15,30 triliun. Dalam komponen pembiayaan utang bruto, Pemerintah telah menganggarkan dana untuk pembayaran kembali utangnya, sehingga kecil sekali kemungkinan Pemerintah tidak dapat melunasi kewajibannya.

Pada bulan April 2018, Pemerintah berhasil memenuhi kebutuhan defisit APBN melalui penerbitan

SBN sebesar Rp189,70 triliun atau 45,76 persen dari target pembiayaan. Sementara itu, melalui penarikan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah memenuhi defisit APBN sebesar Rp17,57 triliun atau 34,21 persen dari target. Tercapainya pemenuhan pembiayaan tersebut merupakan bagian dari strategi *front loading* Pemerintah dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian dinamika perkembangan global.

Di sisi pemenuhan pembiayaan melalui sumber Pinjaman menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Hal ini merupakan langkah Pemerintah dalam meningkatkan peran SBN dalam pembiayaan defisit

APBN dan menjadi salah satu strategi pemenuhan pembiayaan APBN mengingat Indonesia tidak lagi ada dalam kategori *low-income country*, sehingga tidak dapat lagi menerima pinjaman dengan suku bunga yang rendah (*concessional loan*). Selain itu, penerbitan SBN menjadi cara untuk melibatkan masyarakat Indonesia dalam pembangunan Indonesia melalui partisipasi masyarakat sebagai investor SBN.

Beberapa bulan terakhir ini terjadi gejolak pasar seperti terjadinya depresiasi Rupiah terhadap USD yang hampir bersamaan dengan kenaikan harga minyak global. Namun demikian gejolak pasar tersebut memberikan *net impact* yang positif terhadap APBN. Dalam hitungan Pemerintah, kenaikan biaya bunga (ditambah kenaikan subsidi) ternyata masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tambahan penerimaan negara dari migas akibat kenaikan harga minyak. Meskipun memperoleh dampak positif atas kenaikan harga minyak global, namun untuk menghadapi depresiasi Rupiah, Pemerintah juga telah mempersiapkan instrumen lindung nilai mata uang (*currency hedging*) untuk mengelola risiko pelemahan Rupiah.

Dalam masa ketidakpastian di pasar keuangan global serta perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, disamping rencana kenaikan suku bunga The Fed sebanyak 3 kali lagi pada tahun 2018 ini, Pemerintah dalam mengantisipasi kondisi tersebut telah menerapkan *Crisis Management Protocol* (CMP) untuk mengelola risiko di pasar SBN. Disamping itu, telah disiapkan skema *Bond Stabilization Framework* (BSF) untuk memitigasi dampak *sudden reversal* dengan melibatkan BUMN-BUMN terkait.

Disamping itu, dalam mengantisipasi ketidakpastian perkembangan pasar, penerbitan SBN secara *private placement* juga dapat dilakukan, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing, kepada investor domestik maupun investor asing dengan tetap mempertimbangkan kesesuaian biaya dan risiko yang menjadi target Pemerintah. Pemerintah juga dapat menyediakan instrumen utang yang disesuaikan dengan kebutuhan investasi investor sebagai upaya mendorong kontribusinya terhadap pasar keuangan. Selain itu, sejak April 2018 Pemerintah telah menggunakan mekanisme penerbitan SBN dalam valuta asing melalui metode *US SEC Shelf Registration* yang memungkinkan Pemerintah menerbitkan SBN dalam valuta asing setiap saat untuk memanfaatkan momentum positif di pasar.

Strategi pembiayaan melalui utang dilakukan secara hati-hati dengan memperhitungkan biaya, risiko dan kapasitasnya, serta memperhatikan prinsip-prinsip pruden, efisiensi biaya, produktivitas dan keseimbangan. Dengan memanfaatkan kepercayaan investor yang meningkat, dilakukanlah pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya utang.

Posisi Utang  
hingga akhir April  
2018

(dalam Triliun Rupiah)

	Nominal		Growth (yoy)	%
	Apr-17	Apr-18		
<b>Total Utang Pemerintah Pusat</b>	<b>3.667,41</b>	<b>4.180,61</b>	<b>13,99%</b>	<b>100,00%</b>
a. Pinjaman	734,71	773,47	5,28%	18,50%
1. Pinjaman Luar Negeri	729,62	773,91	5,28%	18,37%
Bilateral	317,50	331,24	3,01%	7,82%
Multilateral	368,27	397,82	7,96%	9,51%
Komersial	43,09	43,66	-1,81%	1,01%
Suppliers	0,76	1,19	55,24%	0,03%
2. Pinjaman Dalam Negeri	5,10	5,78	5,18%	0,13%
b. Surat Berharga Negara	2932,69	3407,14	16,18%	81,50%
1. Denominasi Rupiah	2140,47	2427,76	13,42%	58,07%
SUN	1821,26	2049,79	12,55%	49,03%
SBSN	319,20	377,96	18,41%	9,04%
2. Denominasi Valas	792,23	979,38	23,62%	23,43%
SUN	625,64	764,284	22,16%	18,28%
SBSN	166,59	215,094	29,12%	5,15%
Pendapatan Domestik Bruto**		13.991,93		
Rasio Utang thd PDB		29,88%		

\*\* Asumsi PDB hingga April 2018

Sejalan dengan fundamental perekonomian Indonesia yang baik, Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir April 2018 diperkirakan mencapai Rp13.991,93 triliun. Dengan capaian PDB tersebut, rasio utang Pemerintah terhadap PDB tetap terjaga di bawah 30 persen, yakni pada level 29,88 persen.

Dari segi komposisi utang, pinjaman Pemerintah yang berasal dari kreditur Komersial mengalami penurunan sebesar

negatif 1,81 persen, dimana pada akhir April 2017 *outstanding* utang Pemerintah dari kreditur Komersial sebesar Rp43,09 triliun sementara pada bulan yang sama di tahun 2018 sebesar Rp42,31 triliun.

Pertumbuhan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri

tahunan untuk bulan April 2017 dan bulan April 2018 secara keseluruhan mengalami kenaikan sebesar 5,28 persen yoy sementara pertumbuhan tahunan untuk SBN mencapai 16,18 persen yoy.

Hingga akhir April 2018 SBN dalam mata uang Rupiah yang telah diterbitkan Pemerintah sebesar Rp2,049 triliun untuk Surat Utang Negara (SUN) dan sebesar Rp377,96 triliun untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara untuk SBN dalam Valuta Asing hingga akhir April 2018 telah diterbitkan sebesar Rp764,28 triliun dalam bentuk SUN dan sebesar Rp215,09 triliun dalam bentuk SBSN.

Pemerintah mengutamakan pemanfaatan sumber-sumber dalam negeri melalui Surat Berharga Negara baik dalam bentuk SUN maupun SBSN untuk pembiayaan defisit serta untuk pembiayaan produktif yang tidak dapat ditunda. Dengan memanfaatkan kepercayaan investor yang meningkat, pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor dilakukan Pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara. Pendalaman pasar domestik dimaksudkan untuk memperkuat ketahanan (*resilience*) pasar dalam negeri dan memperbesar kapasitas investor yang masuk ke pasar, sehingga akan menciptakan *demand* yang lebih banyak terhadap SBN yang berdampak menurunkan biaya utang.

Pemerintah serius dalam melakukan pendalaman pasar keuangan domestik dan perluasan basis investor, sebagaimana yang dilaksanakan pada bulan Mei 2018 ini Pemerintah meluncurkan SBN Ritel Online (e-SBN) dalam format *Saving Bonds Ritel* (SBR) seri 003. Melalui e-SBN, masyarakat dapat dengan mudah berpartisipasi membiayai pembangunan dengan membeli SBN lewat kanal elektronik.

Selain pendalaman pasar domestik, satu hal yang juga diharapkan mendukung pendalaman pasar SBN kita adalah dampak masuknya SBN (*index inclusion*) dalam *Bloomberg Barclays Global Aggregate Index* pada awal bulan Juni 2018.

Sementara itu di sisi Pinjaman, walaupun semakin diperkecil perannya sebagai sumber pembiayaan, sumber ini tetap dimanfaatkan sebagai pelengkap. Hal ini mengingat adanya beberapa benefit tambahan yang dapat diperoleh seperti adanya transfer pengetahuan dan teknologi dari kreditur, terutama lembaga Multilateral yang juga memiliki tujuan untuk pembangunan global. Selanjutnya, diterapkannya tata kelola yang baik oleh kreditur internasional terhadap pemanfaatan Pinjaman yang akan meningkatkan disiplin kita dalam menjalankan agenda reformasi.



## Kenaikan Peringkat Kredit Indonesia Oleh Moody's

Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional Moody's pada tanggal 13 April 2018 menaikkan peringkat kredit Indonesia ke Baa2/Outlook stabil dari sebelumnya Baa3/Outlook positif.

Faktor kunci penilaian Moody's yang kemudian memutuskan untuk menaikkan peringkat kredit Indonesia adalah kerangka kebijakan yang kredibel dan efektif sehingga dinilai kondusif bagi stabilitas makroekonomi. Penerapan kebijakan, yang salah satunya adalah penerapan kebijakan fiskal yang berhati-hati, memperkuat ketahanan dan kapasitas Indonesia dalam menghadapi gejolak eksternal.

Peringkat Baa2 yang diberikan Moody's merupakan peringkat tertinggi yang diberikan Moody's kepada Indonesia selama ini. Dengan penyematan peringkat Baa2 kepada utang Indonesia, berarti surat berharga yang diterbitkan oleh Indonesia berada dalam kategori *moderate credit risk* dan *medium grade*. Adapun *outlook stabil* menggambarkan posisi *rating* yang akan stabil dalam beberapa waktu ke depan, serta

menunjukkan risiko yang berimbang. Hasil segera yang diperoleh Indonesia saat Moody's menaikkan peringkat utang Indonesia ke Baa2 atau setara dengan level BBB dari lembaga pemeringkat lain adalah penurunan *yield* hingga 5 bps untuk SUN berdenominasi rupiah, 2 bps untuk SUN dalam EUR, dan 0,5 bps untuk SUN dalam USD.

Selain itu, memanfaatkan momentum kenaikan peringkat tersebut, pada tanggal 16 April 2018 Indonesia menerbitkan SUN global - USD *tranche* di Asia dan Euro *tranche* di Eropa. Pada perdagangan tersebut terjadi kelebihan penawaran sebanyak 2,9 kali dengan jumlah yang masuk sebesar EUR3,00 miliar untuk Euro *tranche* dan US\$2,7 miliar untuk USD *tranche*, dibandingkan target yang diambil yakni sebesar EUR1 miliar dan US\$1 miliar. Penerbitan SUN dalam EUR tersebut merupakan penerbitan dengan tingkat kupon terendah dibandingkan kupon-kupon penerbitan SUN dalam EUR yang telah dilakukan selama ini dan juga merupakan penerbitan pertama SUN dalam EUR dengan format *SEC-Registered*.

## Crisis Management Protocol dan Bond Stabilization Framework - Mengelola Volatilitas Pasar SBN Akibat Pengaruh Eksternal

Kenaikan suku bunga jangka pendek the Fed sebesar 25 basis poin serta perang dagang antar Amerika Serikat dengan Tiongkok dikhawatirkan akan menimbulkan *capital outflow* dana asing yang disimpan dalam bentuk Obligasi Negara Indonesia. Lebih jauh, kenaikan suku bunga the Fed memicu kenaikan mata uang Amerika Serikat terhadap mata uang Indonesia sehingga mempengaruhi kenaikan imbal hasil (*yield*) SBN. Sementara di sisi lain, Bank Indonesia hingga akhir April 2018 masih menahan suku bunga acuan sehingga tetap pada angka 4,25 persen.

Kekhawatiran akan adanya pelarian dana asing dari Indonesia akibat kenaikan suku bunga jangka pendek the Fed diharapkan tidak terjadi mengingat kepemilikan asing atas Obligasi Negara Indonesia tercatat hanya mengalami penurunan sedikit yaitu dari 39,82 persen di bulan Desember 2017 menjadi 39,50 persen per tanggal 23 April 2018.

Kepanikan akan krisis global yang terjadi akibat kenaikan suku bunga serta kejadian lainnya sebenarnya tidak perlu menjadikan investor SBN panik. Sebagai bentuk komitmen

Pemerintah untuk melindungi investor obligasi negara terhadap goncangan ekonomi global yang dapat mengakibatkan keluarnya arus modal asing, telah dipersiapkan mekanisme *Crisis Management Protocol* (CMP) serta *Bond Stabilization Framework* (BSF) oleh Pemerintah.

CMP adalah salah satu strategi fiskal pemerintah yang dibuat dengan tujuan memberikan peringatan jika krisis ekonomi global mulai berdampak ke Indonesia. CMP terbagi atas tiga tahap (*level*) kondisi, yaitu kondisi Waspada, kondisi Siaga, dan kondisi Krisis yang ditetapkan dengan memperhatikan indikator di pasar keuangan, yakni *yield* SUN seri *benchmark*, nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan jumlah kepemilikan asing SBN. Sementara itu, BSF ditujukan untuk mengantisipasi keluarnya arus modal asing jika terjadi guncangan ekonomi global.

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengatasi krisis di setiap level kondisi, baik melalui pembelian kembali (*buyback*) SBN di pasar sekunder maupun melakukan penundaan atau penghentian penerbitan SBN.

- Terdapat dua tingkatan perlindungan dalam penerapan BSF yaitu:
- a. Perlindungan tingkat I, dimana apabila terjadi kondisi pada level “Waspada” maka:
    - 1) Digunakan anggaran Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko / DJPPR) untuk *buyback*, dan dapat ditambah dengan penyertaan modal negara yang ada pada Badan Layanan Umum apabila dana *buyback* tersebut tidak mencukupi;
    - 2) Digunakan anggaran BUMN terkait untuk *buyback* SBN;
    - 3) Digunakan anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk *buyback* SBN.
  - b. Perlindungan tingkat II, dimana apabila terjadi kondisi pada level “Siaga” maka:
    - 1) Digunakan anggaran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) untuk *buyback* SBN;
    - 2) Digunakan anggaran dari BUMN terkait untuk *buyback* SBN;
    - 3) Digunakan anggaran BPJS untuk *buyback* SBN.

Jika kemudian terjadi kondisi pada level “Krisis”, maka Saldo Anggaran Lebih (SAL) akan digunakan untuk *buyback* SBN. Namun demikian, mengingat fundamental ekonomi Indonesia senantiasa berada pada level yang aman, hingga saat ini CMP masih berstatus “Aman” dan BSF belum perlu untuk diaktifkan.

Halaman Kosong

## Realisasi APBN s.d. 30 April 2017 dan 2018

(dalam miliar rupiah)

URAIAN	2017			2018		
	APBNP	Realisasi s.d. 30 April	% thd APBNP	APBN	Realisasi s.d. 30 April	% thd APBN
<b>A. PENDAPATAN NEGARA</b>	<b>1,736,060.1</b>	<b>465,940.2</b>	<b>26.8%</b>	<b>1,894,720.4</b>	<b>527,824.5</b>	<b>27.9%</b>
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1,732,952.0	465,773.2	26.9%	1,893,523.5	526,828.2	27.8%
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1,472,709.9	374,958.0	25.5%	1,618,095.5	416,926.3	25.8%
a. Pajak Dalam Negeri	1,436,730.9	363,554.6	25.3%	1,579,395.5	403,120.6	25.5%
b. Pajak Perdagangan Internasional	35,979.0	11,403.4	31.7%	38,700.0	13,805.7	35.7%
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,242.1	90,815.2	34.9%	275,428.0	109,901.9	39.9%
II. HIBAH	3,108.1	167.0	5.4%	1,196.9	996.3	83.2%
<b>B. BELANJA NEGARA</b>	<b>2.133,295,9</b>	<b>538,108.8</b>	<b>25.2%</b>	<b>2,220,657.0</b>	<b>582,943.4</b>	<b>26.3%</b>
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1,366,956.6	272,675.2	19.9%	1,454,494.4	331,014.3	22.8%
1. Belanja K/L	798,585.3	135,136.5	16.9%	847,435.2	165,875.4	19.6%
2. Belanja Non /L	568,371.3	137,538.7	24.2%	607,059.2	165,138.9	27.2%
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	766,339.3	265,433.6	34.6%	766,162.6	251,929.1	32.9%
1. Transfer ke Daerah	706,339.3	248,782.3	35.2%	706,162.6	237,654.8	33.7%
2. Dana Desa	60,000.0	16,651.3	27.8%	60,000.0	14,274.3	23.8%
<b>C. KESEIMBANGAN PRIMER</b>	<b>(178,039.4)</b>	<b>3,740.8</b>	<b>-2.1%</b>	<b>(87,329.5)</b>	<b>24,191.8</b>	<b>-27.7%</b>
<b>D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)</b>	<b>(397,235.8)</b>	<b>(72,168.6)</b>		<b>(325,936.6)</b>	<b>(55,118.9)</b>	
% Surplus / (Defisit) Anggaran thd PDB	(2.92)	(0.54)		(2.19)	(0.37)	
<b>E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I+II+III+IV+V)</b>	<b>397,235.8</b>	<b>195,400.0</b>	<b>49.2%</b>	<b>325,936.6</b>	<b>188,711.1</b>	<b>57.9%</b>
I. PEMBIAYAAN UTANG	461,343.6	193,637.1	42.0%	399,219.4	187,164.7	46.9%
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,733.8)	-	0.0%	(65,654.3)	-	0.0%
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,668.7)	1,624.6	-44.3%	(6,690.1)	1,494.5	-22.3%
IV. KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,005.4)	-	0.0%	(1,121.3)	-	0.0%
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	300.0	138.3	46.1%	183.0	51.9	28.4%
KELEBIHAN / (KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN		123,231.4			133,592.2	

Halaman Kosong



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
REPUBLIC INDONESIA